ISSN 2962-4177

Lensa Pembangunan

BULETIN

EDISI 1 JANUARI - MARET 2026

INDEKS MODAL MANUSIA SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN BERKUALITAS



ISSN 2962-4177


KALIMANTAN UTARA
BENUANTA
SOCIAL MEDIA
BAPPERIDA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Follow
BAPPERIDA.KALTARA
BAPPERIDAPROV.KALIMANTANUTARA
BAPPERIDA.KALTARAPROV.GO.ID
SCAN ME

KATA PENGANTAR



SELAMAT DATANG DI LENSA PEMBANGUNAN

Kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar perencanaan dan inovasi daerah di Kalimantan Utara serta berbagai informasi lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami menghadirkan Buletin Lensa Pembangunan edisi pertama tahun 2026 di hadapan para pembaca setia.

Kali ini, kami mengajak Anda menelisik lebih dalam tentang Indeks Modal Manusia, fondasi krusial yang menentukan apakah pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan berkualitas dan merata. Di tengah pesona kekayaan alam yang kita miliki, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci agar potensi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Edisi ini juga dirangkai dengan beragam sajian menarik, sesi dialog interaktif bersama narasumber di bidang kesehatan, liputan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 dan Sosialisasi Kamus Pokir DPRD 2027 yang akan membantu menyelaraskan program prioritas dengan perencanaan daerah.

Untuk memperluas wawasan, kami juga menyiapkan ruang khusus bagi inovasi daerah dan rubrik Jelajah yang siap membawa Anda menjelajahi berbagai tempat-tempat indah di Kaltara.

Kami berharap buletin ini menjadi teman diskusi dan inspirasi dalam setiap langkah pembangunan. Selamat menikmati bacaan.

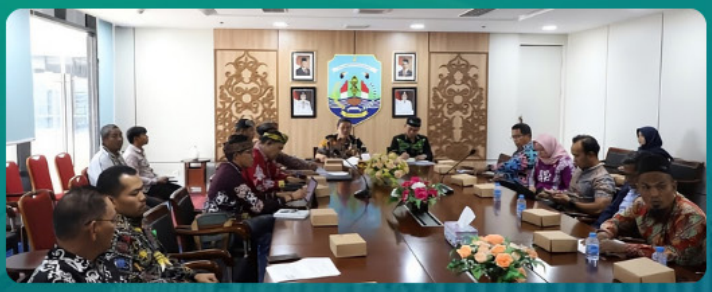
Bertius

DAFTAR ISI









TOPIK UTAMA 07
Indeks Modal Manusia Sebagai Fondasi Pembangunan Berkualitas

Membedah Lima Variabel IMM: 12
Potret Kesehatan dan Pendidikan di Kalimantan Utara

DIALOG TOKOH 16
Dr. Usman S.K.M., M.Kes.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Ketahanan Gizi dan Geopolitik Global: 25
Tantangan Percepatan Penurunan Stunting di Tengah Konflik Global

Forum Konsultasi Publik 40
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027

Forum Perangkat Daerah 41
Tahun 2027

Sinergi Perencanaan 42
Penanganan Jalan di Kawasan Apau Kayan

Dorong Perlindungan Inovasi Lokal 44
Bapperida Percepat Pembentukan Sentra KI Daerah

REDAKTUR **BERTIUS**
EDITOR **MOCHAMAD SARKAWI, LINDA MARLISA**
PENULIS **TIM PENULIS**
DESAIN GRAFIS **ADY SETIAWAN, CRISTOVE DISMOND**
ALAMAT REDAKSI **JL. AGATISH TJ. SELOR, KABUPATEN BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA**

Bapperida_kaltara
Bapperidaprov_kalimantanutara
Bapperidaprovkaltara
Bapperida_kaltaraprov.go.id











Transformasi Hasil Studi PERA 46
Menjadi Policy Brief untuk Perkuat Kemandirian Fiskal

Pemprov Sosialisasikan Kamus Pokir DPRD 2027 48
Perkuat Integrasi ke Dokumen Perencanaan Daerah

Mentari Kaltara 2026 : 50
Ruang Suara Kelompok Rentan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

INOVASI DAERAH 53
Pemenang Inovasi Daerah tahun 2025 Kategori Masyarakat

LINGKUNGAN 56
Memperkuat Peran Generasi Muda dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut

SEKILAS INFO 58
Informasi Singkat Kegiatan Bapperida

POTRET RUANG 60
Dari Selat Hormuz Ke Ruang Daerah

MUATAN LOKAL 64
Benuanta.
Bahasa, Identitas dan Semangat Membangun Kaltara

JELAJAH 68
Meja Panjang di Kabupaten Bulungan

Akselerasi pembangunan SDM, penguatan infrastruktur konektivitas, serta optimalisasi sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kompas utama demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum
Gubernur





INDEKS MODAL MANUSIA SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN BERKUALITAS

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kualitas manusia Indonesia itu sendiri.

Modal manusia merupakan konsep yang mengacu pada akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang dimiliki individu sepanjang hidupnya (Becker, 1965). Dalam konteks pembangunan ekonomi, modal manusia dipandang sebagai faktor produksi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker pada tahun 1960-an, yang menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai determinan utama pembangunan ekonomi.

Menurut teori modal manusia, investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan menghasilkan peningkatan produktivitas yang dapat diukur melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Dalam model pertumbuhan endogen, akumulasi modal manusia merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Lucas, 1988). Teori ini menjadi dasar pengembangan berbagai indeks pengukuran modal manusia, termasuk IMM yang dikembangkan oleh Bank Dunia.



Dalam konteks Kalimantan Utara, konsep modal manusia menjadi sangat relevan mengingat provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi dalam modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan membantu provinsi ini dalam transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

Pentingnya investasi dalam modal manusia juga didukung oleh fakta bahwa sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah akan habis pada suatu saat, sementara modal manusia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era ekonomi digital dan globalisasi, kualitas modal manusia menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing suatu wilayah di tingkat nasional maupun internasional.

Definisi Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia menggabungkan indikator kesehatan dan pendidikan menjadi ukuran modal manusia yang dapat diharapkan diperoleh anak yang lahir hari ini pada usia 18 tahun, dalam skala 0 hingga 1 *(World Bank, 2020)*. Indeks ini dikembangkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018 sebagai alat untuk mengukur dan membandingkan kualitas modal manusia antar negara dan wilayah. IMM dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi produktivitas generasi masa depan berdasarkan kondisi kesehatan dan pendidikan saat ini.

Diluncurkan pada tanggal 11 Oktober 2018, Indeks Modal Manusia mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan untuk produktivitas generasi pekerja berikutnya *(World Bank, 2018)*. Indeks ini berbeda dengan indeks pembangunan manusia (IPM) karena fokusnya pada potensi produktivitas ekonomi masa depan, bukan pada pencapaian pembangunan manusia secara umum. IMM mengintegrasikan tiga komponen utama: tingkat kelangsungan hidup anak, kualitas dan kuantitas pendidikan, dan status kesehatan populasi.

Komponen Indeks Modal Manusia

IMM terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait dan berkontribusi terhadap pembentukan modal manusia. Komponen pertama adalah tingkat kelangsungan hidup anak *(survival rate),* yang mengukur probabilitas anak yang lahir akan bertahan hidup hingga usia sekolah. Komponen ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan dasar dan kondisi sanitasi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan anak-anak pada masa awal kehidupan.

Komponen kedua adalah kualitas dan kuantitas pendidikan yang diperoleh anak-anak. Hal ini diukur melalui dua indikator utama: lama sekolah yang disesuaikan dengan kualitas *(quality-adjusted years of schooling)* dan skor tes pembelajaran internasional. Komponen ini tidak hanya mengukur berapa lama anak bersekolah, tetapi juga seberapa baik mereka belajar dan menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.

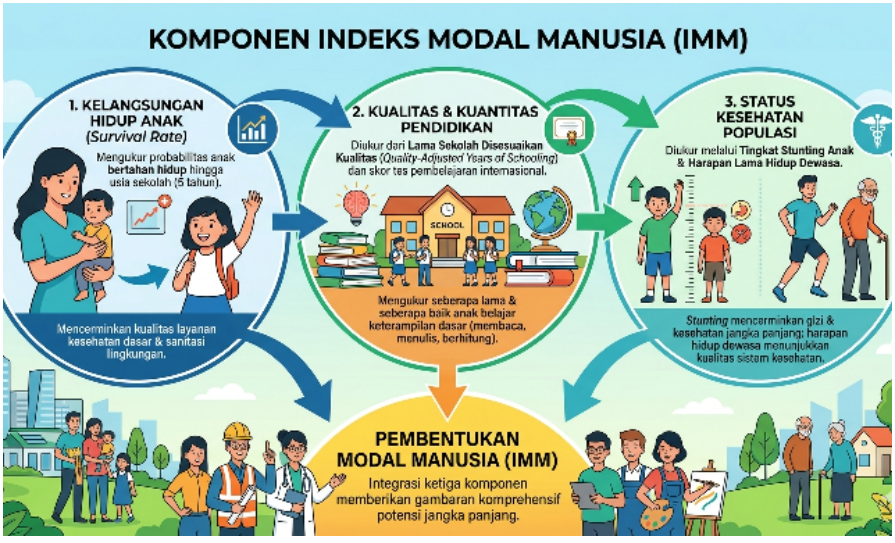
Komponen ketiga adalah status kesehatan populasi yang diukur melalui tingkat stunting anak dan harapan lama hidup penduduk dewasa. Stunting mencerminkan kualitas gizi dan kesehatan anak dalam jangka panjang, sedangkan tingkat harapan hidup dewasa menunjukkan kualitas sistem kesehatan secara keseluruhan.

Integrasi ketiga komponen ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi modal manusia suatu wilayah dalam jangka panjang. Setiap komponen memiliki bobot yang berbeda dalam perhitungan IMM dan saling berinteraksi untuk membentuk modal manusia yang optimal.

Kegagalan dalam satu komponen dapat mempengaruhi kinerja komponen lainnya, yang menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan modal manusia. Dalam konteks Kalimantan Utara, pemahaman yang baik tentang ketiga komponen ini akan membantu dalam mengidentifikasi area prioritas untuk investasi pembangunan manusia.

Indeks Modal Manusia vs Indeks Pembangunan Manusia

Perbedaan mendasar antara IMM dan IPM terletak pada filosofi dan pendekatan konseptual yang digunakan. IPM dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan pendekatan *capability approach* yang menekankan pada kemampuan manusia untuk mencapai kehidupan yang bermakna. IPM mengukur pencapaian rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia: hidup panjang dan sehat, berpengetahuan, dan standar hidup yang layak.





Pendekatan ini bersifat retrospektif, mengukur apa yang telah dicapai oleh suatu populasi pada titik waktu tertentu. Sebaliknya, IMM menggunakan pendekatan *human capital theory* yang fokus pada potensi produktivitas ekonomi masa depan. Indeks ini diharapkan mampu untuk dapat mempercepat investasi yang lebih baik dan lebih banyak dalam pembangunan modal manusia *(World Bank, 2020).*

IMM bersifat prospektif, mengukur potensi apa yang dapat dicapai oleh generasi masa depan berdasarkan investasi dalam kesehatan dan pendidikan saat ini. Perbedaan filosofis ini menghasilkan pemilihan indikator dan metodologi pengukuran yang berbeda antara kedua indeks.

Dalam konteks Kalimantan Utara, pemahaman terhadap perbedaan filosofis ini penting untuk menentukan indeks mana yang lebih sesuai untuk tujuan perencanaan pembangunan. IPM lebih cocok untuk evaluasi pencapaian pembangunan manusia secara umum, sementara IMM lebih tepat untuk perencanaan investasi modal manusia jangka panjang. Kedua indeks ini dapat digunakan secara komplementer untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi dan potensi pembangunan manusia di provinsi tersebut.

Perbedaan signifikan antara IMM dan IPM terletak pada dimensi dan indikator yang digunakan dalam pengukuran. IPM menggunakan tiga dimensi utama: kesehatan (diukur melalui angka harapan hidup saat lahir), pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup (diukur melalui pendapatan nasional bruto per kapita). Ketiga dimensi ini dipandang sebagai aspek fundamental dari pembangunan manusia yang memungkinkan individu untuk memiliki pilihan dan kebebasan dalam menjalani kehidupan *(United Nations Development Programme, 2020).*

IMM menggunakan pendekatan yang berbeda dengan fokus pada tiga komponen: kelangsungan hidup anak hingga usia sekolah, kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan pembelajaran, dan kesehatan populasi. Di tahun 2020, skor Indeks Modal Manusia Indonesia adalah 0,54, dimana telah meningkat dari sebelumnya 0,53 di tahun 2018 (Databoks, 2021). IMM tidak memasukkan indikator pendapatan atau standar hidup secara langsung, tetapi fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas masa depan.

Dalam implementasi di Kalimantan Utara, perbedaan dimensi ini memiliki implikasi praktis yang penting. IPM dapat digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia secara umum dan membandingkannya dengan provinsi lain. Sementara itu, IMM dapat digunakan untuk mengidentifikasi area investasi prioritas yang akan memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masa depan. Pemahaman yang baik tentang perbedaan dimensi

ini akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang tepat sasaran.

Keterkaitan Investasi Modal Manusia dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Investasi modal manusia memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tabel di bawah menggambarkan lima SDGs utama yang memiliki relevansi langsung dengan investasi modal manusia:

SDG 2 (*Zero Hunger*/Tanpa Kelaparan) berfokus pada upaya penurunan stunting, yang merupakan indikator penting dalam pembangunan gizi masyarakat. Penurunan angka stunting tidak hanya mencerminkan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjamin perkembangan optimal anak sejak dini.

SDG	Fokus	Relevansi
SDG 2	*Zero Hunger*	Penurunan stunting
SDG 3	*Good Health & Wellbeing*	Kelangsungan hidup & imunisasi
SDG 4	*Quality Education*	Akses dan mutu pembelajaran
SDG 6	*Clean Water & Sanitation*	Sanitasi–air minum layak
SDG 8	*Decent Work & Economic Growth*	Pemanfaatan SDM produktif

SDG 3 (*Good Health & Wellbeing*/Kehidupan Sehat dan Sejahtera) menekankan pada kelangsungan hidup dan imunisasi. Investasi dalam layanan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, dan program imunisasi yang komprehensif menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif.

SDG 4 (*Quality Education* /Pendidikan Berkualitas) berkaitan erat dengan akses dan mutu pembelajaran. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan.

SDG 6 (*Clean Water & Sanitation*/Air Bersih dan Sanitasi Layak) menyoroti pentingnya sanitasi dan akses terhadap air minum yang layak. Infrastruktur dasar ini merupakan prasyarat untuk mendukung kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit.

SDG 8 (*Decent Work & Economic Growth*/Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) berfokus pada pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif. Melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, SDM yang berkualitas dapat berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kelima SDGs ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, menunjukkan bahwa investasi modal manusia merupakan pendekatan holistik yang esensial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Target pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025 - 2029

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan modal manusia di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan target peningkatan nilai IMM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Target tersebut dirancang secara bertahap, yaitu sebesar 0,56 pada tahun 2025, meningkat menjadi 0,57 pada tahun 2026, 0,58 pada tahun 2027, 0,59 pada tahun 2028, dan diharapkan mencapai 0,60 pada tahun 2029.

Target-target ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan SDM yang dijalankan selama periode perencanaan. Dengan demikian, penetapan target peningkatan IMM secara bertahap hingga mencapai 0,60 pada tahun 2029 bukan sekadar komitmen administratif, melainkan sebuah *roadmap* strategis yang menuntut konsistensi, kolaborasi, dan inovasi dalam setiap intervensi pembangunan SDM di Kalimantan Utara. Target ini menjadi arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak secara sinergis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

MEMBEDAH LIMA VARIABEL IMM:

POTRET KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI KALIMANTAN UTARA

Untuk memahami mengapa nilai IMM suatu daerah berada pada tingkat tertentu, kita perlu membedah satu per satu variabel yang membentuknya. Kajian Peningkatan IMM Provinsi Kalimantan Utara oleh FEB UGM (2025) mengidentifikasi lima variabel utama yang secara langsung menentukan nilai IMM: (1) Angka Kematian Bayi di Bawah Lima Tahun, (2) Prevalensi Stunting, (3) Angka Harapan Hidup, (4) Harapan Lama Sekolah, dan (5) Nilai Asesmen Lulusan Sekolah. Bagaimana kondisi masing-masing variabel ini di Kaltara?

16,65	**11,1%**	**13,2 Tahun**	**9,35 Tahun**
AKB per 1.000 KH (2020)	Stunting Terkini (2022)	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah

Variabel 1: Angka Kematian Bayi di Bawah Lima Tahun (U5MR)

Angka Kematian Bayi di Bawah Lima Tahun (*Under-5 Mortality Rate*/U5MR) adalah probabilitas seorang anak meninggal sebelum ulang tahun kelimanya per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini menjadi komponen pertama (P) dalam formula IMM karena mencerminkan kualitas fundamental layanan kesehatan suatu daerah.

Wilayah	AKB per 1.000 KH (2020)	Keterangan
Kalimantan Barat	17,47	Tertinggi di Kalimantan
Kalimantan Tengah	17,95	—
Kalimantan Selatan	17,22	—
Kalimantan Timur	15,51	Terendah di Kalimantan
Kalimantan Utara	16,65	Di bawah nasional, ke-2 terbaik di Kalimantan
Indonesia (Nasional)	16,85	Rata-rata nasional

Sumber: BPS, Laporan Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Kajian mengidentifikasi lima kategori faktor penentu U5MR: kondisi ibu dan anak (berat lahir rendah, pendidikan ibu), sosial ekonomi rumah tangga, sanitasi dan lingkungan, kualitas layanan kesehatan, serta perilaku dan akses informasi. Intervensi perlu diarahkan secara bertahap: jangka pendek (revitalisasi posyandu, imunisasi, bidan desa), menengah (penguatan sistem rujukan), dan panjang (pengentasan kemiskinan).

Fakta Kritis: Tantangan di Lapangan

Pada tahun 2024, Kalimantan Utara mencatat 199 kasus kematian balita, sebuah angka yang mengindikasikan masih lemahnya kapasitas sistem kesehatan daerah, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. Keterbatasan dokter di puskesmas, penolakan vaksin di sebagian komunitas pedalaman, dan lemahnya sistem rujukan menjadi faktor yang memperparah situasi ini.

Variabel 2: Prevalensi Stunting
Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan adalah salah satu indikator kesehatan yang paling menentukan masa depan seorang anak. Dampaknya tidak berhenti pada tubuh yang lebih pendek, stunting juga merusak perkembangan otak, menurunkan kemampuan kognitif, menekan prestasi pendidikan, dan mengurangi produktivitas ekonomi hingga dewasa.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stunting (%)	31,1	31,6	33,3	27,0	26,3	18,1	12,5	11,1

Sumber: BPS & e-PPGBM | Catatan: Data 2023–2024 belum tersedia secara lengkap

Namun tantangan belum selesai. Stunting yang masih tinggi di Kabupaten Nunukan dan Malinau mengindikasikan ketimpangan spasial yang serius.

Faktor penyebabnya bersifat multidimensi: kemiskinan rumah tangga (struktural), gizi buruk ibu hamil dan balita (langsung), sanitasi buruk (tidak langsung), rendahnya pendidikan ibu, dan faktor budaya seperti pantangan makan pada ibu hamil (sosial-budaya).

Capaian Positif: Penurunan Dramatis Stunting
Kalimantan Utara mencatat penurunan stunting dari 31,1% (2015) menjadi 11,1% (2022), penurunan 20 poin persentase dalam tujuh tahun. Ini menunjukkan efektivitas program intervensi gizi, termasuk Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), suplementasi gizi ibu hamil, dan edukasi gizi berbasis komunitas.

Variabel 3: Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai seseorang sejak lahir berdasarkan kondisi kematian saat ini. Indikator ini mencerminkan kualitas sistem kesehatan secara keseluruhan, termasuk pelayanan preventif-kuratif, kualitas lingkungan, dan perilaku hidup masyarakat.



AHH Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren peningkatan dan secara keseluruhan berada di atas rata-rata nasional, dengan Kota Tarakan sebagai penyumbang terbesar. Namun, disparitas antar-kabupaten sangat mencolok. Nunukan dan Tana Tidung konsisten berada di bawah rata-rata provinsi, mencerminkan ketimpangan layanan kesehatan yang tajam antara kawasan perkotaan dan pedalaman.

Kajian mengidentifikasi empat kelompok faktor penentu AHH: (1) faktor sosial-ekonomi, pendapatan per kapita, kemiskinan, dan pendidikan; (2) infrastruktur lingkungan, air bersih, sanitasi, dan kualitas perumahan; (3) sistem kesehatan, ketersediaan fasilitas dan tenaga medis; serta (4) ketimpangan wilayah. Pergeseran beban penyakit ke penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes menuntut kebijakan yang bergeser dari kuratif ke preventif-promotif.

Variabel 4: Harapan Lama Sekolah (HLS)
Harapan Lama Sekolah (HLS) mengukur berapa tahun pendidikan formal yang diharapkan ditempuh seorang anak berdasarkan tingkat partisipasi pendidikan saat ini. Berbeda dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mengukur pencapaian aktual, HLS merepresentasikan prospek masa depan sistem pendidikan sebuah daerah.

Indikator	2017	2018	2020	2022	2023/2024
HLS (tahun)	12,79	12,82	12,93	13,06	13,20
RLS (tahun)	—	9,10	9,00	9,27	9,35
APM SD (%)	92,27	92,72	93,46	93,69	95,18
APM SMP (%)	77,54	78,20	79,09	79,38	81,61

Sumber: BPS Kalimantan Utara

Faktor Pendorong HLS
Program BOS dan KIP menjaga partisipasi sekolah. Beasiswa daerah bagi keluarga miskin. Digitalisasi pembelajaran. Peningkatan kapasitas guru. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan.

Faktor Penghambat HLS
Kemiskinan keluarga memaksa anak bekerja. Pernikahan dini di wilayah pedesaan. Infrastruktur sekolah menengah terbatas di daerah 3T. Kondisi geografis sulit dijangkau. Faktor budaya yang kurang mendorong pendidikan berkelanjutan.

Variabel 5: Nilai Asesmen Lulusan Sekolah *(Learning Outcomes)*
Variabel ini mengukur kualitas aktual pembelajaran yang diterima siswa, bukan sekadar lama bersekolah. Dalam kerangka IMM, nilai asesmen direpresentasikan oleh *Harmonized Learning Outcomes (HLO),* skor yang menggambarkan kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional maupun internasional.

Hasil Asesmen Nasional di Kalimantan Utara menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum mencapai tingkat literasi dan numerasi minimum. Hanya sekitar 43% penduduk Kaltara yang memiliki kemampuan literasi memadai. Indonesia secara nasional juga mengalami *learning reversal* dimana partisipasi sekolah meningkat, tetapi capaian pembelajaran justru stagnan. Hasil PISA 2022 yang menunjukkan penurunan signifikan Indonesia di tiga mata pelajaran menjadi konfirmasi global atas persoalan ini.

Kondisi Guru di Kalimantan Utara
Sertifikasi guru di Kalimantan Utara baru mencapai sekitar 40%. Ketidakmerataan distribusi guru berkualitas antara Kota Tarakan dengan kabupaten-kabupaten lain menjadi penghambat utama peningkatan mutu pembelajaran. Guru di daerah terpencil masih dominan menggunakan pendekatan tradisional dan memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi pembelajaran. Pelatihan pedagogik berbasis kompetensi dan insentif bagi guru di wilayah tertinggal menjadi intervensi prioritas.



Lima faktor penentu kualitas asesmen yang teridentifikasi: (1) kualitas dan distribusi guru, ketimpangan guru berkualitas antara perkotaan dan pedesaan memperlebar kesenjangan hasil belajar; (2) kondisi sosial ekonomi keluarga; (3) sarana dan infrastruktur sekolah; (4) motivasi dan faktor psikososial siswa; serta (5) jenis dan kualitas instrumen asesmen itu sendiri.

Sintesis: Keterkaitan Antar Variabel

Kelima variabel di atas tidak berdiri sendiri, mereka saling mempengaruhi dalam jaringan sebab-akibat yang kompleks. Kemiskinan menjadi akar masalah lintas semua variabel, ia menurunkan gizi ibu hamil (stunting), membatasi akses layanan kesehatan (U5MR dan AHH), memaksa anak putus sekolah (HLS), dan mengurangi dukungan belajar di rumah (nilai asesmen). Di sisi lain, pendidikan ibu berperan sebagai penghubung vital. Ibu berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki anak yang lebih sehat, lebih lama bersekolah, dan berprestasi lebih baik secara akademik.

Kemiskinan adalah akar masalah lintas semua variabel Indeks Modal Manusia. Intervensi terhadapnya bersifat sistemik dan kompleks. Tetapi efek bergandanya terhadap seluruh indikator menjadikannya prioritas yang tidak bisa diabaikan.

WAWANCARA EKSKLUSIF

Membangun Kesehatan Kaltara dari Akar : Akses, Data dan Perilaku

NARASUMBER

Dr. Usman, S.K.M., M.Kes

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Menuju target Indeks Modal Manusia (IMM) 0,60 pada 2029, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menjalankan strategi berlapis, dari inovasi layanan 'jemput bola' spesialistik, pemberdayaan desa merekrut nakes kontrak, hingga transformasi budaya melalui GERMAS. Kepala Dinas Kesehatan Kaltara berbagi pandangan jujur tentang titik lemah kritis, inovasi lapangan, dan agenda tiga tahun ke depan.

0,60	80 %	9 %
TARGET IMM Kaltara 2029	Target UCI Per desa - masih sulit tercapai	Stunting Riil Data lapangan (Sigizi)

P1 **Target Indeks Modal Manusia Kaltara adalah 0,60 pada 2029. Indikator kesehatan apa yang menjadi prioritas utama untuk didorong guna mencapai target tersebut?**

Ketika berbicara mengenai indeks modal manusia, tentunya bagaimana membangun sumber daya manusia. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini erat kaitannya dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Utara secara menyeluruh.

Untuk layanan kesehatan primer, interaksi langsung dengan masyarakat memang lebih banyak terjadi di tingkat fasilitas kesehatan, baik di puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya. Namun, peran pemerintah provinsi bagaimana memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena kita juga memiliki penilaian melalui indeks kesehatan masyarakat. Jadi, pola ini sangat bergantung pada upaya kita dalam menyelenggarakan layanan yang komprehensif, yang diawali dari langkah preventif atau upaya pencegahan. Upaya ini memang banyak dijalankan di puskesmas, sementara layanan kuratif juga telah tersedia sebagai bagian dari kelanjutannya.Hal ini juga terdapat pada layanan kesehatan lanjutan di rumah sakit, termasuk di dalamnya layanan rehabilitatif.

Bagi kami di tingkat provinsi, fokus utamanya adalah bagaimana mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bahkan, kami memiliki inovasi berupa layanan 'jemput bola',

yaitu membawa pelayanan kesehatan langsung ke tengah masyarakat.

Layanannya bukan sekadar pelayanan biasa, melainkan sudah bersifat spesialistik. Memang, cakupannya belum terlalu luas, tetapi langkah ini menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat dan menunjukkan bahwa kita hadir khususnya untuk layanan spesialistik yang selama ini sulit dijangkau. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga diintegrasikan dengan upaya promotif dan preventif.

Bahkan, kami menyertakan kegiatan *on the job training* dengan melibatkan petugas puskesmas setempat. Tujuannya agar mereka semakin terampil menangani kasus spesialistik yang kami hadirkan, misalnya di bidang spesialis anak dan kandungan. Dengan demikian, jika terjadi kondisi emergensi, petugas di puskesmas sudah bisa memberikan penanganan awal.

INOVASI UNGGULAN

Layanan 'Jemput Bola' Spesialistik

Layanan kesehatan spesialistik dibawa langsung ke masyarakat, diintegrasikan dengan promotif preventif dan *on the job training* petugas Puskesmas setempat untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus spesialistik (anak & kandungan).

P2 **Titik lemah paling kritis saat ini ada di mana (stunting, imunisasi, KIA, layanan primer) ?**

Kalau berbicara tentang program, khususnya beberapa program prioritas misalnya yang terkait dengan upaya penurunan angka stunting kami memang memiliki dua sumber data yang berbeda. Pertama, berdasarkan hasil survei, dan kedua, berdasarkan data riil yang kami capai di lapangan

Sebenarnya, berdasarkan data riil di lapangan, angka stunting kita sudah turun di bawah 10 persen kira-kira sekitar 9 persen. Namun, jika merujuk pada hasil survei, angkanya masih berada di kisaran 17 persen.

Terkait program lain yang menyentuh masyarakat secara langsung, terutama untuk ibu dan anak, seperti imunisasi, kami memang masih menghadapi sejumlah kendala. Artinya, target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai.

9 %	17 %
Data Lapangan (Sigizi Kesga) Sudah di bawah 10%	Data Survei (SSGI Nasional) Masih menjadi acuan kebijakan

Dulu, kami memiliki target UCI *(Universal Child Immunization),* di mana cakupan imunisasi di setiap desa minimal harus mencapai 80 persen. Target ini masih sulit kami capai karena beberapa hambatan, terutama terkait aksesibilitas. Jarak tempuh masyarakat ke fasilitas kesehatan terdekat pun masih cukup jauh.

Kendala ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga ada di wilayah perkotaan. Meski demikian, kami terus berupaya mengedukasi masyarakat agar mau mendatangi setidaknya Posyandu, sebagai titik layanan imunisasi yang paling dekat dan mudah diakses.



P3 **Menurut Bapak faktor dominan stunting di Kaltara apa saja dan intervensi mana yang paling efektif ?**

Memang kalau bicara soal intervensi stunting, ada dua jenis yang utama, yaitu intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik memang lebih banyak berada di ranah kesehatan, sedangkan intervensi sensitif melibatkan lintas sektor. Menariknya, intervensi sensitif justru memegang peran paling besar kontribusinya mencapai sekitar 70 persen. Contoh konkretnya adalah penyediaan sanitasi, air bersih, perbaikan lingkungan, serta ketahanan pangan.

Sementara itu, intervensi spesifik kami lakukan secara berkesinambungan, mulai dari hulu hingga hilir. Misalnya di tahap remaja, kami memberikan penyuluhan pencegahan anemia dan membagikan tablet tambah darah (FE) bagi remaja putri. Tujuannya, ketika mereka kelak menjadi ibu, kondisi kesehatan mereka sudah lebih siap dan tidak berisiko anemia saat hamil.

ALUR INTERVENSI SPESIFIK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP

Remaja Putri	Tablet FE & edukasi anemia
Ibu Hamil	ANC 6x + 90 tablet FE
Pasca Lahir	ASI Eksklusif 6 bulan
Balita	Posyandu + pantau KMS



Ketika memasuki masa kehamilan, intervensi difokuskan pada pemeriksaan ANC *(Antenatal Care)*. Dulu standar kunjungan hanya 4 kali, kini kami dorong menjadi 6 kali. Kami juga memastikan ibu hamil mengonsumsi minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan, sekaligus memantau kecukupan gizinya secara berkala.

Semua ini masuk dalam paket intervensi spesifik. Setelah melahirkan, fokus beralih pada persalinan yang sehat dan pemberian ASI eksklusif selama

> Intervensi sensitif memegang kontribusi terbesar sekitar 70 persen dalam pencegahan stunting. Sektor kesehatan tidak bisa bekerja sendiri."
>
> Dr. Usman S.K.M., M.Kes.
> Kadinkes. Provinsi Kaltara

6 bulan pertama untuk mendukung tumbuh kembang bayi.

Hingga anak memasuki usia balita, intervensi terus berlanjut melalui peran Posyandu. Di sini, kami melakukan penimbangan rutin, memantau kecukupan gizi, dan menilai pertumbuhan anak menggunakan buku KMS. Melalui indikator-indikator tersebut, kami bisa mendeteksi secara dini bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menyesuaikan intervensi yang diperlukan.

P4 Bagaimana capaian layanan KIA dan posyandu, serta hambatan utamanya?

Capaian layanan KIA di Kalimantan Utara saat ini sudah cukup baik dan terus menunjukkan peningkatan, seperti cakupan kunjungan ibu hamil, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan bayi dan balita serta pelayanan ibu nifas dan ASI Eksklusif.

Pelayanan di posyandu juga tetap dilaksanakan secara rutin, dengan pola pelayanan posyandu yang terintegrasi, tidak hanya fokus pada ibu dan balita, tetapi menggabungkan berbagai layanan dasar dalam satu tempat, waktu dan sistem pelayanan. Di Kalimantan Utara, pendekatan pelayanan seperti ini sangat relevan karena keterbatasan akses layanan di beberapa wilayah.

Hambatan yang dihadapi adalah masih rendahnya angka kunjungan (tingkat partisipasi masyarakat) atau yang dikenal dengan angka D/S (Jumlah yang Datang/Sasaran).

Di samping itu hambatan / kendala lainnya seperti keterbatasan kader dan tenaga kesehatan baik dari segi jumlah maupun kapasitas, keterbatasan sarana dan prasanana penunjang serta masih kurangnya integrasi atau peran serta lintas sektor, mengingat kolaborasi antar sektor merupakan kunci utama dalam menjalankan program ini.

HAMBATAN UTAMA POSYANDU

- Rendahnya angka D/S, tingkat partisipasi masyarakat ke Posyandu masih jauh dari target
- Keterbatasan kader dan tenaga kesehatan baik dari segi jumlah maupun kapasitas
- Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai di banyak wilayah
- Kurangnya integrasi lintas sektor, padahal kolaborasi antar sektor adalah kunci keberhasilan

P5 Bagaimana kondisi distribusi tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) di wilayah perbatasan dan pedalaman seperti Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung ?

Kalau kita melihat distribusi tenaga kesehatan di Kalimantan Utara, memang masih terpusat di wilayah-wilayah kota. Kendala utama yang kami hadapi adalah soal redistribusi. Tidak mudah memindahkan tenaga kesehatan apalagi yang sudah berkeluarga ke daerah DTPK (Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau wilayah 3T.

Upaya yang bisa kami lakukan saat ini lebih difokuskan pada penguatan kapasitas pengadaan tenaga kesehatan sesuai kemampuan yang ada. Salah satu alternatif yang bisa ditempuh adalah melalui pemanfaatan Dana Desa. Beberapa provinsi lain sudah menerapkannya, desa dapat merekrut tenaga kesehatan secara kontrak, mirip dengan skema PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Misalnya, jika desa membutuhkan perawat atau bidan, mereka dapat merekrut secara kontrak. Fasilitas tempat tinggal juga disediakan di lokasi

penugasan. Sementara untuk pembekalan teknis dan orientasi tugas, kami dari Dinas Kesehatan yang akan menanganinya. Secara pendidikan formal, mereka sudah memiliki kompetensi dasar baik sebagai bidan maupun perawat sehingga tinggal kami berikan briefing terkait tugas spesifik di lapangan. Untuk skema penggajiannya, dapat diatur melalui kontrak kerja.

> "Masih ada beberapa Puskesmas yang belum lengkap dengan 9 jenis tenaga kesehatan standar, terutama dokter gigi, dan di sejumlah tempat bahkan dokter umum juga masih belum tersedia."

Skema ini cukup realistis mengingat keterbatasan yang kami miliki. Faktanya, masih ada beberapa puskesmas yang belum lengkap dengan 9 jenis tenaga kesehatan standar. Terutama dokter gigi, dan di sejumlah tempat bahkan dokter umum juga masih belum tersedia.

Oleh karena itu, pengadaan tenaga kesehatan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Selain skema kontrak berbasis Dana Desa, opsi lain yang memungkinkan adalah melalui mekanisme penugasan khusus. Mengingat regulasi saat ini sudah membatasi penerimaan tenaga honorarium, penugasan khusus oleh pemerintah daerah dapat menjadi solusi alternatif.

SKEMA SOLUSI DISTRIBUSI NAKES 3T

Dana Desa	:	Rekrut perawat/bidan kontrak berbasis kebutuhan desa
Hunian	:	Fasilitas tempat tinggal disediakan di lokasi penugasan
Dinkes	:	Briefing teknis & orientasi tugas spesifik lapangan
Penggajian	:	Diatur melalui skema kontrak kerja yang jelas
Alternatif	:	Mekanisme penugasan khusus oleh pemerintah daerah

P6 **Program perubahan perilaku dan edukasi gizi apa yang paling efektif di Kaltara menurut Bapak ?**

Ketika berbicara soal perilaku, di sinilah letak tantangan terbesar kita di sektor kesehatan. Perilaku sendiri merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, fokus kita harus pada upaya edukasi yang berkelanjutan, agar masyarakat terdorong untuk memanfaatkan potensi pangan yang ada di lingkungan sekitarnya demi meningkatkan status gizi mereka.





Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara kental dengan budaya dan adat istiadat yang cukup beragam, hal ini tentunya juga mempengaruhi pola asuh dan pola makan masyarakat. Karena itu program perubahan perilaku dan edukasi gizi yang diberikan kepada masyarakat juga harus dengan pendekatan berbasis budaya dan pemanfaatan pangan lokal.

Bentuk edukasi yang diberikan bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti edukasi berbasis praktik langsung seperti demo masak dengan bahan lokal, kelas ibu balita, edukasi interaktif dengan penggunaan kartu gizi, poster, permainan, dan gamifikasi, serta edukasi melalui media sosial dan digital. Pemilihan bentuk edukasi tentunya disesuaikan dengan karakteristik sasaran, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, serta sosial budaya.

METODE EDUKASI GIZI EFEKTIF DI KALTARA

- Demo masak berbasis bahan lokal & pangan tradisional Kaltara
- Kelas ibu balita : pendekatan kelompok yang terarah dan terstruktur
- Gamifikasi: kartu gizi, poster edukatif, dan permainan interaktif
- Edukasi melalui media sosial & platform digital berbasis budaya setempat

P7 Terkait dengan air bersih dan sanitasi, bagaimana kondisi dan strategi kedepan ?

Ketersediaan air bersih memang salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Di Kalimantan Utara, sebenarnya kita memiliki sumber air yang cukup melimpah. Tantangannya justru terletak pada bagaimana mengolah dan mengelola sumber daya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kalau tidak salah, program pengadaan air bersih seperti PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) berada di bawah Kementerian PUPR. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memanfaatkan program ini secara maksimal. Kuncinya ada pada pemberdayaan masyarakat, bagaimana warga dapat mengolah sumber air yang ada di sekitarnya menjadi air layak konsumsi melalui pengelolaan yang tepat.

Jadi, pada akhirnya yang kita tuju adalah tersedianya air bersih, air yang benar-benar sehat dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari.

P8 **Apa *quick wins* atau agenda prioritas bapak selama 3 tahun ke depan untuk kemajuan kesehatan di Kalimantan Utara?**

Fokus kami saat ini adalah memastikan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, sehingga setiap wilayah merasa terlayani dengan memadai. Mudah-mudahan, upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga direspons secara sinergis oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Di sisi lain, kami tetap konsisten mengedukasi masyarakat agar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) benar-benar diutamakan. Sebab, secara teoritis ada empat determinan utama yang memengaruhi derajat kesehatan: lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan hereditas atau faktor keturunan.

Keempat faktor ini saling berkaitan. Lingkungan yang bersih dan sehat tentu akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Begitu pula dengan pelayanan kesehatan yang prima, kemudahan akses, penanganan yang cepat, serta dukungan teknologi, akan sangat menentukan hasil kesehatan. Perilaku juga memegang peran krusial, meskipun memang membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Terakhir, ada faktor hereditas, yaitu kondisi kesehatan tertentu yang memang dipengaruhi oleh garis keturunan. Secara teori, apabila keempat faktor ini dapat kita kelola dengan baik, niscaya akan tercipta masyarakat yang lebih sehat dan mandiri.

L	P	P	H
Lingkungan	**Pelayanan**	**Perilaku**	**Hereditas**
Sanitasi, air bersih & kebersihan	Akses, kualitas & kecepatan	PHBS (perlu waktu panjang)	Faktor genetik keturunan







P9 **Mewujudkan Kaltara sehat adalah tanggung jawab bersama. Apa pesan Bapak agar semangat ini dapat terus terjaga dan menjadi budaya hidup sehat bagi seluruh masyarakat di Kaltara?**

Kami telah mengembangkan sejumlah program yang selaras dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Misalnya, melalui dorongan aktivitas fisik rutin, fasilitasi pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta edukasi gizi untuk membiasakan konsumsi buah dan sayur secara konsisten.

Meski akronimnya terdengar singkat, ruang lingkup GERMAS justru sangat luas, mulai dari pencegahan penyakit tidak menular, peningkatan kualitas hidup, hingga pembentukan budaya sehat di tingkat keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, gerakan ini memang perlu terus kita galakkan dan integrasikan dalam kebijakan maupun kegiatan sehari-hari, agar dampaknya benar-benar berkelanjutan dan merata.

"Apabila keempat determinan kesehatan lingkungan, pelayanan, perilaku, dan hereditas dapat kita kelola dengan baik secara bersama-sama, niscaya akan tercipta masyarakat Kalimantan Utara yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi."

GERMAS bukan sekadar akronim, ia adalah cetak biru transformasi budaya sehat Kalimantan Utara yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan kehidupan sehari-hari, agar dampaknya benar-benar berkelanjutan dan merata.

Pendidikan hari ini menuntut penguasaan teknologi sekaligus karakter yang kuat.
Digitalisasi dan peningkatan kualitas Sekolah menjadi prioritas.

Ingkong Alla, SE.,M.Si
Wakil Gubernur



Ketahanan Gizi dan Geopolitik Global:

Tantangan Percepatan Penurunan Stunting di Tengah Konflik Global

Andi Dian Anggreani, SKM., MPA
Penelaah Teknis Kebijakan — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

9,9 % Penurunan Kaltara sejak 2021 (vs 4,9 % Nasional)	**29,8 %** Stunting kelompok ekonomi terbawah (Q1)	**+27 %** Lonjakan harga minyak Brent (Feb–Mar 2026)	**+74 %** Lonjakan harga gas global (Feb–Mar 2026)

Pendahuluan

Stunting masih menjadi fokus utama pembangunan kesehatan Indonesia. Prevalensi nasional turun dari 21,5% (2023) menjadi 19,8% (2024), namun masih memerlukan percepatan strategik untuk mencapai target 14,2% pada 2029.

Komitmen penurunan stunting telah dituangkan dalam RPJMN 2025–2029. Provinsi Kalimantan Utara mencatat capaian lebih baik dengan prevalensi 17,6% pada 2024. Tren positif ini merupakan capaian yang patut disyukuri, namun percepatan yang lebih inovatif tetap diperlukan.

Anak yang mengalami stunting menghadapi risiko lebih tinggi untuk memiliki kapasitas kognitif yang rendah, produktivitas yang rendah, serta kerentanan terhadap penyakit di usia dewasa (Maliati, 2022). Dalam perspektif ekonomi makro, stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja hingga 11% dari PDB (Horton & Steckel, 2014) serta berkontribusi pada peningkatan potensi kemiskinan antargenerasi melalui penurunan pendapatan seumur hidup total sebesar 10% (TNP2K, 2017).

Konflik di Timur Tengah yang terjadi sejak 28 Februari 2026, antara Iran vs. Amerika Serikat dan Israel, sangat menyita perhatian dunia. Perang yang ditandai dengan agresi militer AS dan sekutunya kepada Iran itu berlanjut dengan ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran sebagai aksi balasan.

> Selat Hormuz menangani sekitar 25% perdagangan minyak global, 20% gas alam cair, dan hampir 30% perdagangan pupuk dunia — penutupannya mengguncang rantai pasok pangan Indonesia.
> Sumber: LPEM UI, 2026; Sinpo.id, 2026

Terhambatnya arus perdagangan dan rantai pasok energi serta pupuk berpotensi memicu lonjakan harga yang akan memperberat biaya hidup dan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin yang menjadi kelompok dengan risiko stunting tertinggi, di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Pola dan Dominasi Stunting

Tren prevalensi stunting di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Utara telah turun secara konsisten dalam empat tahun terakhir. Namun penurunan ini perlu diakselerasi untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.

Secara nasional, angka tersebut masih sangat dekat dengan batas aman WHO, yang menetapkan ambang batas kategori “tinggi” jika berada pada *range* 20%–30% (who.int, 2026). Laju penurunan Kalimantan Utara telah melampaui angka nasional: sejak 2021, Kaltara berhasil menurunkan 9,9 persen prevalensi stunting, sementara nasional hanya 4,9 persen. Namun pada tahun 2024, Kaltara mengalami perlambatan bahkan kenaikan sebesar 0,2 persen dibandingkan 2023. Hal ini menunjukkan

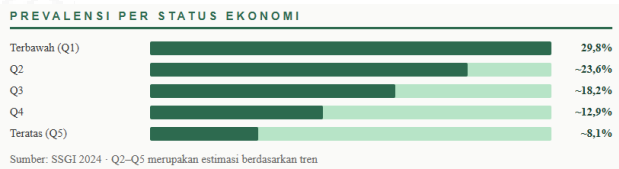
19,8 %	17,6 %	14,2 %
Prevalensi Stunting Nasional 2024	Prevalensi Stunting Kaltara 2024	Target RPJM 2029

bahwa persoalan stunting masih bersifat struktural dan belum dapat dikendalikan secara utuh.

Data SSGI 2024 menunjukkan tren kenaikan kasus stunting mulai terjadi pada anak usia >6 bulan, dengan dominasi tertinggi pada anak rentang usia 24–35 bulan. Lonjakan kenaikan tertinggi mencapai 8,4%, mengindikasikan kegagalan dalam pemenuhan asupan gizi anak sesuai usia.

Anak pada rentang usia >11 bulan memasuki masa aktivitas motorik lebih aktif sehingga membutuhkan asupan energi dan gizi yang adekuat. Kegagalan memenuhi asupan gizi di masa ini meningkatkan risiko kekurangan gizi secara signifikan, terutama saat peralihan usia 6–11 bulan menuju 12–23 bulan.

Prevalensi per Status Ekonomi



Konflik Geopolitik: Ancaman Berlapis

Eskalasi ketegangan antara Iran dan koalisi AS–Israel berdampak secara global, khususnya melalui penutupan Selat Hormuz. Dalam periode 27 Februari–9 Maret 2026, harga minyak Brent melonjak menjadi US$91,8 per barel (+27%), sementara harga gas mencapai €55,8 per MWh (+74%).

Sekitar sepertiga perdagangan pupuk global (±16 juta ton) melewati Selat Hormuz. Indonesia masih mengimpor bahan baku pupuk seperti sulfur dari Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Gangguan pasokan ini dapat mendorong kenaikan harga pupuk domestik yang berdampak pada biaya produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Sejak memanasnya konflik pada 28 Februari 2026, aliran modal asing yang keluar dari pasar obligasi Indonesia tercatat sebesar US$0,41 miliar hingga 6 Maret 2026, yang mengakibatkan rupiah melemah dan sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS pada 9 Maret (LPEM UI, 2026).

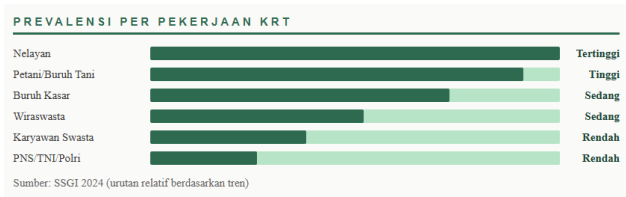
Paradoks Struktural

Nelayan dan Petani/Buruh Tani memiliki prevalensi stunting tertinggi nasional, meski nelayan sangat dekat dengan sumber protein. Paradoks ini mencerminkan kemiskinan struktural: kedua kelompok ini mendominasi struktur kemiskinan nasional (Tirto.id, 2024; Kompas.id, 2025).

Pelemahan rupiah berdampak pada mahalnya biaya impor pangan dan bahan baku pupuk, yang berpotensi menimbulkan kenaikan harga pangan dan melemahkan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin yang paling rentan terhadap stunting.

Analisis UNICEF menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% harga pangan global dikaitkan dengan peningkatan kerawanan pangan tingkat sedang atau parah sebesar 3,5%. Kenaikan 5% pada harga riil pangan dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi akut sebesar 9% dan kekurangan gizi akut parah sebesar 14% (Headey dan Ruel, 2023).

Prevalensi per Pekerjaan KRT



Strategi Intervensi Terintegrasi

Gizi, Ketahanan Pangan & Resiliensi Kritis Kalimantan Utara — Bagian I: Pilar 1, 2 & 3

Pilar 1 Intervensi Gizi pada *Window of Opportunity*

Menghadapi tantangan ganda, prevalensi stunting yang masih cukup tinggi dan guncangan geopolitik yang berpotensi memperlemah ketahanan pangan dibutuhkan respons kebijakan yang bersifat simultan, berlapis, antisipatif, dan inovatif.

Data SSGI 2024 secara eksplisit menunjukkan bahwa lonjakan kasus stunting mulai terjadi pada usia >6 bulan dengan puncak pada rentang 24–35 bulan. Ini merupakan *window of opportunity* yang tidak boleh terlewat. Diperlukan penguatan intervensi berbasis bukti pada fase pemberian MP-ASI melalui:

Langkah Prioritas Pilar 1

Penguatan promosi dan edukasi gizi secara intensif bagi ibu, mencakup kualitas, kuantitas, dan frekuensi MP-ASI sesuai perkembangan usia anak, berbasis bahan pangan lokal yang tersedia dan terjangkau, terutama pada keluarga miskin, kelompok nelayan, dan petani/buruh tani.

Penguatan peran posyandu sebagai titik deteksi dini dengan pemantauan tumbuh kembang bulanan yang lebih ketat dan rujukan cepat bagi anak dengan tanda-tanda *growth faltering*. Pemberian subsidi MP-ASI bergizi tinggi bagi keluarga miskin maupun keluarga risiko stunting

Anak pada rentang usia >11 bulan memasuki masa aktivitas motorik yang lebih aktif, sehingga membutuhkan asupan energi dan gizi yang adekuat sesuai usianya.

Kegagalan dalam memenuhi asupan gizi di rentang usia masa aktif tersebut berpotensi meningkatkan risiko anak mengalami kekurangan gizi secara signifikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan angka stunting.

> Kenaikan prevalensi stunting yang signifikan terjadi saat peralihan dari usia 6–11 bulan menuju 12–23 bulan — masa kritis yang harus menjadi prioritas intervensi MP-ASI berbasis pangan lokal.
> Analisis SSGI 2024

Pilar 2 Reformasi Kebijakan Pangan untuk Kelompok Rentan

Fakta bahwa 29,8% anak di kelompok status ekonomi terbawah mengalami stunting, serta paradoks tingginya stunting di keluarga nelayan yang justru dekat dengan sumber protein, mengonfirmasi bahwa persoalan ini bukan semata pengetahuan gizi, melainkan ketidakmampuan akses ekonomi terhadap pangan bergizi.

Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga sangat terkait dengan struktur ekonomi keluarga. Masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi secara ekonomi menjadi kelompok yang paling berisiko terhadap permasalahan gizi.

Langkah Prioritas Pilar 2

Perluasan dan peningkatan kualitas program bantuan pangan bergizi, bukan sekadar beras yang memasukkan komponen protein hewani, protein nabati, serta kacang-kacangan untuk keluarga miskin dengan balita.

Program Protein Harian Keluarga Miskin dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, dan balita keluarga miskin, melalui skema bantuan bersyarat yang terintegrasi dengan Puskesmas dan Posyandu.

Membangun rantai pasok bersumber pangan lokal yang inklusif berbasis desa, dengan memastikan nelayan dan petani kecil mendapat insentif untuk dapat mengonsumsi sebagian hasil tangkapan atau panennya sendiri.



Kebijakan pangan yang berpihak pada kelompok rentan harus dirancang secara kontekstual, mempertimbangkan keunikan kondisi geografis dan sosial ekonomi masing-masing wilayah, termasuk dinamika komunitas nelayan dan pertanian di Kalimantan Utara.

Data Kunci: Kemiskinan & Gizi
Nelayan dan Petani/Buruh Tani mendominasi struktur kemiskinan nasional sekaligus menempati posisi tertinggi prevalensi stunting. Program bantuan pangan harus menarget dua kelompok ini secara spesifik dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis bukti.

Pilar 3 — Mitigasi Risiko Geopolitik terhadap Ketahanan Pangan Daerah

Penutupan Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga minyak dunia hingga 27% dan harga gas hingga 74% hanya dalam 10 hari (27 Februari–9 Maret 2026). Tekanan ini secara langsung mengancam stabilitas harga pangan dan kemampuan daerah dalam mendanai program percepatan penurunan stunting. Indonesia saat ini masih mengimpor sejumlah bahan baku pupuk seperti sulfur yang berasal dari Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Dengan terganggunya pasokan kebutuhan bahan baku pupuk, harga pupuk domestik berpotensi terdorong naik, yang akan berdampak pada kenaikan biaya produksi pertanian maupun penurunan kuantitas dan kualitas hasil panen.

Langkah Prioritas Pilar 3
Perluasan dan penguatan budi daya serta kebun gizi skala rumah tangga ataupun komunitas berbasis RT/Desa untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal yang tidak bergantung pada rantai pasok global.
Penguatan Sentra/Wilayah *Cluster* Pangan yang bekerja sama dengan BUMDes untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi di tingkat lokal dengan harga yang terjangkau bagi kelompok rentan.
Pengembangan sistem peringatan dini *(early warning system)* atas potensi krisis pangan lokal yang terhubung dengan *dashboard* stunting daerah.

Setiap kenaikan 10% harga pangan global dikaitkan dengan peningkatan kerawanan pangan tingkat sedang atau parah sebesar 3,5%. Ketahanan pangan lokal adalah benteng pertama perlindungan gizi anak.
UNICEF, 2025; Headey dan Ruel, 2023

Penguatan ketahanan pangan berbasis lokal bukan sekadar solusi jangka pendek atas krisis geopolitik, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun ketahanan daerah yang mandiri dan berkelanjutan, yang akan turut memperkuat fondasi penurunan stunting secara struktural.

Strategi Intervensi Terintegrasi

Pilar 4, 5 & 6: Penguatan 1.000 HPK, Ruang Fiskal, dan Koordinasi Lintas Sektor

Pilar 4 — Penguatan Intervensi Spesifik & Sensitif pada 1.000 HPK

Persoalan stunting merupakan permasalahan struktural yang memerlukan perbaikan kualitas pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi yang tepat pada masa tersebut terbukti dapat mempercepat penurunan stunting secara signifikan dan berdampak jangka panjang.

Langkah Prioritas Pilar 4
Penguatan dan peningkatan akses serta pemanfaatan data kelompok sasaran keluarga risiko stunting yang menjadi faktor utama keberhasilan penguatan intervensi terfokus berbasis bukti pada 1.000 HPK.

Penguatan intervensi spesifik *continuum of care* terpadu dan terintegrasi yang dimulai pada masa prakonsepsi hingga pemberian MP-ASI secara optimal dan konsisten.

Akselerasi penguatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif keluarga risiko stunting melalui penajaman target sasaran dan lokus, penajaman peta proses bisnis dan target kinerja, serta penguatan sistem monitoring evaluasi terintegrasi.

Penajaman target sasaran dan lokus intervensi menjadi kunci efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Data keluarga risiko stunting yang akurat dan mutakhir harus menjadi dasar pengambilan keputusan program di setiap jenjang pemerintahan.

Intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan — dari prakonsepsi hingga MP-ASI — adalah investasi paling cost-effective untuk mencegah stunting dan membangun modal manusia Indonesia masa depan.
WHO, 2023; TNP2K, 2017

Kebijakan fiskal yang responsif terhadap dinamika global dan berpihak pada program gizi anak merupakan cerminan komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kunci Fiskal Antisipatif
Dana kontinjensi pangan harus disiapkan sebelum krisis terjadi, bukan sebagai respons reaktif. Ruang fiskal yang terbatas justru menuntut prioritisasi yang lebih tajam: lindungi anggaran gizi dari pemotongan dan rancang mekanisme respons cepat berbasis kondisi darurat.

Pilar 5 — Penguatan Ruang Fiskal yang Terarah dan Antisipatif

Di tengah tekanan pelemahan rupiah dan ketidakpastian global, ruang fiskal terutama di daerah menjadi semakin sempit. Namun justru di sinilah tantangan prioritas belanja harus dipertajam agar program percepatan penurunan stunting tetap berjalan optimal.

Langkah Prioritas Pilar 5
Memanfaatkan potensi Dana Insentif Fiskal (DIF) serta penajaman penggunaan dana transfer provinsi ke kabupaten/kota. Arah kebijakan sumber pembiayaan anggaran daerah harus dikaitkan secara eksplisit dengan capaian penurunan stunting sebagai indikator kinerja daerah, mendorong kompetisi positif antardaerah.

Melindungi anggaran program gizi dan penanggulangan penyakit dari pemotongan fiskal ataupun belanja yang tidak terfokus. Program gizi ibu dan anak serta penanggulangan penyakit adalah investasi modal manusia jangka panjang yang dampaknya jauh melampaui biaya yang dialokasikan.

Mengalokasikan dana kontinjensi untuk respons krisis pangan, antisipasi lonjakan harga pangan global dengan menyiapkan instrumen fiskal yang dapat diaktifkan cepat seperti subsidi harga, voucher pangan, atau perluasan PKH berbasis kondisi darurat gizi.

Pilar 6 — Penguatan Koordinasi Lintas Sektor & Sistem Surveilans

Stunting adalah permasalahan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendirian. Diperlukan arsitektur koordinasi yang lebih kuat, sistematis, dan terukur di seluruh jenjang pemerintahan.

Langkah Prioritas Pilar 6
Perkuat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di segala level mulai dari tingkat desa hingga provinsi, dengan mandat yang lebih kuat dan terukur untuk mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, sosial, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam satu platform aksi yang terukur.
Bangun sistem surveilans gizi yang responsif terhadap guncangan eksternal: indikator kerawanan pangan dan daya beli masyarakat harus menjadi bagian dari *dashboard* stunting daerah, bukan hanya data antropometri balita.
Perkuat kemitraan bersama para pemangku kepentingan dalam program intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif untuk memastikan cakupan yang lebih luas, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sistem surveilans gizi yang terintegrasi dengan indikator makroekonomi & geopolitik memungkinkan pemda untuk merespons potensi ancaman ketahanan pangan secara proaktif, jauh sebelum dampaknya terasa pada tingkat gizi masyarakat.

Dashboard stunting daerah harus melampaui data antropometri balita, indikator daya beli, harga pangan lokal, dan kerawanan pangan harus menjadi komponen integral sistem pemantauan yang responsif terhadap guncangan eksternal.
Analisis Penulis, 2026

Kolaborasi lintas sektor yang sinergis antara Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, BKKBN, dan Bapperida merupakan prasyarat utama keberhasilan percepatan penurunan stunting di tengah kompleksitas tantangan global yang semakin tinggi.

Sintesis & Pesan Utama Kebijakan

Respons Strategis atas Tantangan Ganda: Stunting dan Guncangan Geopolitik Global

Tantangan Berlapis yang Mendesak

Indonesia dan khususnya Kalimantan Utara, menghadapi tantangan ganda yang memerlukan respons kebijakan simultan dan berlapis. Di satu sisi, prevalensi stunting yang masih di atas 14,2% menuntut percepatan program intervensi yang lebih strategik. Di sisi lain, guncangan geopolitik global berpotensi mengikis capaian-capaian penurunan stunting yang telah diraih dengan susah payah.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas agresi militer koalisi AS–Israel pada Februari 2026 telah menciptakan tekanan berlapis: kenaikan harga energi yang mendorong inflasi pangan, pelemahan rupiah yang memahalkan biaya impor, dan potensi gangguan pasokan pupuk yang mengancam produktivitas pertanian nasional.

Semua tekanan ini muaranya sama: melemahkan daya beli kelompok miskin yang justru menjadi kelompok paling rentan terhadap stunting. Dengan prevalensi 29,8% pada kelompok ekonomi terbawah, setiap guncangan ekonomi eksternal berpotensi menghapus kemajuan yang telah dicapai dalam satu dekade terakhir.

Urgensi Respons Kebijakan

Analisis menunjukkan bahwa kenaikan 5% harga riil pangan dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi akut sebesar 9% dan kekurangan gizi akut parah sebesar 14%. Dalam konteks Indonesia saat ini, ancaman ini bukan sekadar skenario hipotetis melainkan potensi nyata yang menuntut kesiapsiagaan kebijakan segera.

Kalimantan Utara, sebagai wilayah dengan tren penurunan stunting yang lebih baik dari rata-rata nasional namun mengalami sedikit kenaikan pada 2024, harus menjadikan momentum ini sebagai titik refleksi untuk memperkuat fondasi intervensi agar lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Ringkasan 6 Pilar Strategi

6 Pilar Intervensi Terintegrasi

Pilar 1 : Intervensi Gizi pada *Window of Opportunity*: Edukasi MP-ASI berbasis pangan lokal, penguatan posyandu sebagai deteksi dini, dan subsidi MP-ASI bergizi untuk keluarga miskin.

Pilar 2 : Reformasi Kebijakan Pangan: Bantuan pangan bergizi multikomponen, Program Protein Harian Keluarga Miskin, dan rantai pasok pangan lokal inklusif berbasis desa.

Pilar 3 : Mitigasi Risiko Geopolitik: Kebun gizi komunitas, penguatan *cluster* pangan BUMDes, dan sistem peringatan dini krisis pangan lokal.

Pilar 4 : Intervensi 1.000 HPK: Penguatan data keluarga risiko stunting, intervensi *continuum of care* dari prakonsepsi hingga MP-ASI, dan akselerasi konvergensi intervensi spesifik–sensitif.

Pilar 5 : Penguatan Fiskal: Optimalisasi DIF, perlindungan anggaran gizi, dan dana kontinjensi krisis pangan yang siap diaktifkan.

Pilar 6 : Koordinasi Lintas Sektor: Penguatan TPPS multi-level, surveilans gizi responsif terhadap guncangan eksternal, dan *collaborative governance* lintas pemangku kepentingan.

Pesan Utama untuk Pengambil Kebijakan

Intervensi tidak cukup hanya bersifat teknis kesehatan, ia harus menyentuh dimensi ekonomi, ketahanan pangan, dan ketahanan fiskal secara bersamaan. Stunting adalah cermin dari ketidakadilan struktural yang harus diselesaikan lintas sektor. Analisis Penulis, 2026

Enam pilar strategi yang diusulkan dalam artikel ini bukan pilihan menu yang dapat dipilih sebagian. Keenamnya saling menopang dan harus diimplementasikan secara bersamaan dengan intensitas yang proporsional terhadap kondisi masing-masing daerah.

Target 14,2% prevalensi stunting nasional pada 2029, dan lebih jauh lagi cita-cita Generasi Emas 2045, hanya dapat diraih jika seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah daerah, kementerian sektoral, hingga komunitas lokal, bergerak dalam satu irama kebijakan yang terkoordinasi.

Referensi Utama

SSGI 2021–2024 · RPJMN 2025–2029 · LPEM UI (2026) · UNICEF (2025) · WHO (who.int, 2026) · Headey & Ruel (2023) · Headey & Fan (2008) · Horton & Steckel (2014) · TNP2K (2017) · Maliati (2022) · Sinpo.id (2026) · katadata.co.id (2026) · detikfinance.com (2026) · Tirto.id (2024) · Kompas.id (2025)

Pesan Utama: Respons Kebijakan yang Diperlukan

1. Menghadapi tantangan ganda prevalensi stunting yang masih tinggi dan guncangan geopolitik yang memperlemah ketahanan pangan dibutuhkan respons kebijakan yang bersifat simultan, berlapis, antisipatif, dan inovatif dari seluruh pemangku kepentingan

2. Intervensi tidak cukup hanya bersifat teknis kesehatan, melainkan harus menyentuh dimensi ekonomi, ketahanan pangan, dan ketahanan fiskal secara bersamaan dalam satu platform koordinasi yang kuat dan terukur.

3. Kalimantan Utara dan seluruh daerah di Indonesia harus bersiap menghadapi era ketidakpastian global yang mengancam capaian penurunan stunting yang telah diraih, dengan membangun resiliensi sistem pangan dan gizi lokal.

4. Koordinasi lintas sektor yang kuat, data yang akurat, dan komitmen anggaran yang terlindungi adalah kunci untuk meraih target 14,2% pada 2029 dan mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas.

KESEHATAN GIZI PEMBANGUNAN MANUSIA

Transformasi Pendekatan Konvergensi dalam Percepatan Penurunan Stunting

Di Provinsi Kalimantan Utara Melalui Fokus Strategi Pencegahan Berdasarkan Siklus Hidup

Romih
Penelaah Teknis Kebijakan - Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

Stunting bukan sekadar isu kesehatan masyarakat yang bersifat sektoral, melainkan tantangan fundamental pembangunan manusia yang mengancam daya saing jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara. Kegagalan tumbuh kembang ini berdampak permanen pada kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi generasi mendatang, sebuah beban pembangunan masif jika tidak ditangani secara radikal dan terstruktur.

TARGET NASIONAL PREVALENSI STUNTING

TARGET 2029	TARGET 2045 INDONESIA EMAS
14,4 %	**5 %**
Target antara nasional	Target akhir Visi Indonesia 2045

Evolusi Paradigma: Dari 64 Menjadi 31 Indikator Berbasis Siklus Hidup

Pengurangan dari 64 indikator menjadi 31 indikator inti bukan merupakan pengurangan beban kerja, melainkan penajaman fokus pada intervensi berdampak tinggi *(high-impact interventions)*. Kebijakan ini mengurangi fragmentasi data di tingkat Kecamatan dan Desa, sehingga akurasi intervensi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Paradigma baru mengadopsi "Pendekatan Siklus Hidup" yang memastikan layanan lengkap diterima oleh 6 kelompok sasaran secara kontinu, mulai dari Remaja Putri hingga Rumah Tangga.

Secara ekonomi dan medis, fokus pada pencegahan selama 1.000 HPK jauh lebih efektif dibandingkan intervensi kuratif. Kerusakan fisik dan kognitif akibat stunting bersifat permanen *(irreversible)* sehingga pemberian *Multiple Micronutrient Supplementation (MMS)* minimal 180 tablet bagi ibu hamil dan PMT lokal menjadi investasi yang jauh lebih efisien bagi masa depan Kaltara.

Perbandingan Paradigma Intervensi Lama vs Baru

Dimensi	Fokus Lama Fragmentasi	Fokus Baru Konvergensi & Pencegahan
Orientasi Program	Penanganan kuratif pada balita stunting	Pencegahan preventif di 1.000 HPK
Jumlah Indikator	64 (tumpang tindih & adminis-tratif)	31 inti (presisi & teknis: MMS & PMT Lokal)
Manajemen Data	Tagging anggaran luas dan sering tidak akurat	Berbasis SIPD Kemendagri dengan akurasi tagging tematik
Pendekatan	OPD bekerja secara terfragmentasi	Terintegrasi lintas sektor melalui siklus hidup sasaran

INDIKATOR INTI BARU

31

Turun dari 64, lebih presisi, lebih teknis, lebih berdampak tinggi

Profil Stunting Kaltara: Analisis Data Empiris

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kaltara justru mengalami kenaikan dari 17,4% pada 2023 menjadi 17,6% pada 2024. Angka ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menjaga kualitas layanan di lapangan.

Tren naik ini bukan sekadar statistik, ia adalah alarm keras yang menuntut rekalibrasi strategi segera dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Utara.

6 SASARAN SIKLUS HIDUP

1. **Remaja Putri** — Suplementasi zat besi (FE)
2. **Calon Pengantin** — Skrining & sosialisasi stunting
3. **Ibu Hamil/Nifas/Menyusui** — ANC optimal + 180 tablet MMS
4. **Baduta 0–23 bulan** — PMT lokal berkualitas
5. **Balita 24–59 bulan** — Pemantauan tumbuh kembang
6. **Rumah Tangga** — PHBS & ketahanan pangan

Dua Hambatan Utama yang Harus Didekonstruksi

Pertama, faktor *Predisposing:* rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi dan pola asuh yang benar menjadi akar masalah yang tersembunyi namun fundamental. Tanpa edukasi yang tepat sasaran, perilaku konsumsi gizi tidak akan berubah.

Kedua, faktor Enabling: masalah aksesibilitas ke fasilitas kesehatan dan kurangnya inovasi layanan di Posyandu membuat masyarakat enggan datang secara rutin. Kondisi ini menuntut penguatan aksi konvergensi yang lebih terstruktur dan agresif di tingkat kecamatan.

PREVALENSI STUNTING 2024 (SSGI)

17,6%

Naik dari 17,4% di 2023

KUNJUNGAN POSYANDU (D/S) 2025

39%

Hanya separuh dari target 80%

GAP ASI EKSKLUSIF

24,3%

Capaian 35,7% vs target 60%, gap terbesar di Bulungan & Malinau

CAKUPAN ASI EKSKLUSIF PER WILAYAH

TARAKAN	51,6 %
NUNUKAN	42,5 %
TANA TIDUNG	41,1 %
RATA - RATA	35,7 %
MALINAU	31,0 %
BULUNGAN	19,7 %

Target Nasional : 60 % Merah = Alarm Keras

Kerangka Aksi Konvergensi: Rekonstruksi Langkah Strategis

Stunting adalah permasalahan multisektoral yang tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh sektor kesehatan saja. Aksi Konvergensi harus dipahami sebagai instrumen integrasi program untuk memastikan setiap sasaran menerima paket layanan lengkap secara simultan.

Daerah wajib menjalankan 4 Aksi Utama: Analisis Situasi, Penguatan Perencanaan, Penguatan Pelaksanaan, dan Penilaian Hasil Monev serta 2 Aksi Pendukung (Regulasi dan Publikasi). Implementasi ini harus dipandu oleh prinsip PATRIOT.

Kecamatan memegang peran krusial sebagai jembatan antara kebijakan kabupaten dengan realitas di desa. Camat harus memastikan penandaan anggaran melalui SIPD dilakukan secara presisi, sehingga setiap rupiah benar-benar menyasar indikator yang masih lemah, terutama cakupan ASI Eksklusif dan kehadiran di Posyandu.

PRINSIP PATRIOT	
P	Partisipatif
A	Akuntabel
T	Transparan
R	Responsif
I	Integritas
O	Objektif
T	Terukur

A
Approver (Camat)
Persetujuan akhir & bertanggung jawab atas validitas data kecamatan

V
Verifikator
Validasi atas data yang diinput untuk memastikan akurasi

O
Operator
Menghimpun dan menginput data capaian layanan secara *real-time*

Rekomendasi Kebijakan & Rencana Tindak Lanjut

Untuk memutus tren kenaikan prevalensi stunting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus segera melakukan langkah-langkah preskriptif berikut secara konsisten dan terintegrasi:

AGENDA PRESKRIPTIF PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1. Mobilisasi Kepemimpinan (Pilar 1): Instruksi imperatif untuk mobilisasi Posyandu & ASI Eksklusif, diukur melalui insentif bagi desa yang capai D/S 80%
2. Inovasi 'Posyandu Kreatif': Transformasi Posyandu dengan PMT Lokal berkualitas untuk atasi faktor enabling yang hambat kunjungan masyarakat
3. Gerakan ASI Eksklusif: Diluncurkan di lingkungan Pemprov Kaltara, ruang laktasi layak & konseling menyusui intensif sebagai model perubahan perilaku
4. Digitalisasi Surveilans Gizi: Integrasi ke Web Aksi Bangda tanpa penundaan. Operator, verifikator, dan approver di tiap kecamatan adalah prasyarat mutlak
5. Intervensi Berbasis Siklus Hidup: Remaja putri (tablet FE) → calon pengantin (skrining) → ibu hamil (ANC 6x) → baduta (PMT) → balita (Posyandu) → RT (PHBS)

"Kaltara Bebas Stunting bukan sekadar target teknis, melainkan janji kita bagi masa depan Indonesia 2045. Perubahan harus dimulai hari ini melalui rekalibrasi strategi yang nyata, perencanaan yang sinkron, dan eksekusi yang penuh integritas."

PENDIDIKAN KESEHATAN IPM DAN IMM

Peran Pendidikan dan Kesehatan dalam Peningkatan IPM Kaltara

Kajian berbasis data Indeks Modal Manusia (IMM) mengungkap tantangan struktural di balik tren positif IPM Kalimantan Utara dari kesenjangan akses pendidikan di wilayah perbatasan hingga disparitas

Cici Tri Yulita
Perencana Ahli Pertama - Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

9,35	13,21	9,4 %	57,7 %
Rata-rata Lama Sekolah (th)	Harapan Lama Sekolah (th)	Prevalensi Stunting (Sigizi)	Imunisasi Dasar Lengkap
↑ dari 9,1 th (2018)	Capaian 2024	↓ dari 18,1% (2020)	Target: 80% per desa

BAGIAN 1

Dimensi Pendidikan dalam Pembangunan Manusia Kaltara

Di Kalimantan Utara, capaian IPM menunjukkan tren positif, namun Kajian Indeks Modal Manusia (IMM) mengungkap bahwa peningkatan akses pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan kualitas pembelajaran, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Dalam pengukuran IPM, dimensi pendidikan diukur melalui dua indikator utama: Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS di Kalimantan Utara meningkat dari 9,1 tahun pada 2018 menjadi 9,35 tahun pada 2024, sementara HLS mencapai 13,21 tahun. Meski trennya positif, capaian ini masih berada di bawah beberapa provinsi lain di Kalimantan.

Jika dilihat dari partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD sudah cukup tinggi di angka 95,2 persen. Namun pada jenjang SMP, APM hanya mencapai 81,6 persen mengindikasikan tantangan serius pada masa transisi pendidikan dasar ke menengah, di mana sebagian anak tidak melanjutkan sekolah.

Tantangan Struktural yang Saling Berkaitan

Permasalahan pendidikan di Kaltara tidak berdiri sendiri. Kondisi sosial ekonomi keluarga memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak; keterbatasan akses di wilayah perbatasan dan pedalaman memperparah kesenjangan; sementara ketimpangan distribusi tenaga pendidik menciptakan variasi kualitas pembelajaran yang signifikan antar kabupaten/kota.

Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa capaian pembelajaran di Kalimantan Utara masih



APM SD — 2024

95,2%

Partisipasi SD tinggi namun tidak otomatis berlanjut ke SMP

PARTISIPASI SEKOLAH DAN DURASI BELAJAR

APM SD	95,2 %
APM SMP	81,6 %
RLS 2024	9,35 Tahun
RLS 2018	9,10 Tahun
HLS 2024	13,21 Tahun

relatif rendah dan sangat bervariasi. Faktor infrastruktur yang terbatas serta akses terhadap teknologi pembelajaran memperkuat kesenjangan antarwilayah yang sudah ada.

CATATAN PENTING :

GAP TRANSISI SD-SMP

Selisih APM SD–SMP sebesar 13,6 poin mencerminkan anak putus sekolah yang perlu intervensi di tingkat keluarga dan sosial.

REKOMENDASI KAJIAN IMM

1. Penguatan akses pendidikan di wilayah terpencil melalui program afirmasi yang tepat sasaran
2. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan redistribusi tenaga pendidik
3. Pemanfaatan teknologi pendidikan untuk menjembatani kesenjangan akses antarwilayah
4. Penguatan program beasiswa dan dukungan pendidikan bagi kelompok rentan

BAGIAN II

Dimensi Kesehatan : Disparitas Akses dan Tantangan Layanan Primer

Umur Harapan Hidup (UHH) Kaltara berada di atas rata-rata nasional, namun capaian ini menyimpan disparitas antar wilayah yang tajam antara perkotaan dan wilayah perbatasan, dengan stunting, imunisasi, dan pemerataan tenaga kesehatan sebagai titik lemah yang perlu segera ditangani.

Dalam pengukuran IPM, dimensi kesehatan direpresentasikan melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Di Kalimantan Utara, angka harapan hidup tercatat meningkat dan berada di atas rata-rata nasional, yang sebagian besar didorong oleh kontribusi Kota Tarakan. Namun di balik angka rata-rata ini, terdapat kesenjangan antarwilayah yang masih lebar.

Prevalensi stunting menunjukkan dua narasi berbeda tergantung sumber data. Data Sigizi Kesga Terpadu mencatat penurunan signifikan dari 18,1% (2020) menjadi 9,4% (2024). Sementara data SSGI justru menunjukkan kenaikan tipis dari 17,4% menjadi 17,6%, mengindikasikan bahwa perbaikan di lapangan belum sepenuhnya tertangkap survei nasional, atau terdapat fragmentasi dalam pencatatan.

Akses Layanan: Masalah Geografis dan Struktural

Cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai 57,69 persen dari anak usia dini, jauh dari target UCI 80 persen per desa. Hambatan aksesibilitas bukan hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di wilayah perkotaan. Karakteristik wilayah Kaltara yang didominasi perbatasan menciptakan tantangan distribusi tenaga dan infrastruktur kesehatan.

Masalah kesehatan tidak bisa dilepaskan dari determinan sosial: tingkat pendidikan, kondisi ekonomi rumah tangga, dan akses sanitasi-air bersih saling memengaruhi. Stunting, misalnya, bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga pola asuh, kondisi lingkungan, dan tingkat kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Karakteristik wilayah Kaltara yang didominasi daerah perbatasan dan wilayah dengan akses terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan kesehatan. Keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah terpencil, ketimpangan infrastruktur, serta belum optimalnya integrasi layanan KIA menjadi kendala utama yang berdampak pada kelompok rentan seperti ibu dan anak.

> **Pembangunan kesehatan bukan hanya tentang meningkatkan angka umur harapan hidup, tetapi memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan produktif.**



UHH KALTARA

Di Atas Nasional

Didorong Kota Tarakan, belum merata ke wilayah perbatasan dan pedalaman

Indikator	Capaian	Status
Imunisasi Dasar	57,69%	Perlu
UHH	> Nasional	Baik
Air Layak	Cukup	Belum Merata
Sanitasi	Cukup	Belum Merata
Nakes 3T	Terbatas	Kurang

STUNTING: DUA SUMBER DATA

Data Sigizi Kesga Terpadu

2020 **18,1 %** → 2024 **9,4 %**

Data SSGI (Survei Nasional)

2023 **17,4 %** → 2024 **17,6 %**

Dua sumber tidak dapat dibandingkan langsung karena berbeda metodologi. Keduanya menuntut perhatian serius.

LANGKAH PRIORITAS PENGUATAN KESEHATAN

- Penguatan layanan kesehatan primer melalui Puskesmas dan revitalisasi Posyandu di seluruh wilayah
- Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap terutama di wilayah 3T dan perbatasan
- Percepatan penurunan stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang terintegrasi
- Pemerataan tenaga kesehatan ke wilayah terpencil manfaatkan skema Dana Desa kontrak
- Pemanfaatan teknologi untuk pencatatan dan pemantauan layanan kesehatan secara *real-time*

"Tantangan geografis dan ketimpangan akses di Kalimantan Utara menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis wilayah didukung data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor yang solid untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan."



Pemprov Kaltara Gelar Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2026 di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Prov. Kaltara dan dihadiri oleh DPRD, Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Kaltara, Akademisi, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Forum Konsultasi Publik ini dibuka secara resmi oleh Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses penyusunan RKPD. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan, saran, serta tanggapan konstruktif dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD sebelum memasuki tahapan perencanaan selanjutnya.

Dalam Forum Konsultasi Publik, Kepala Bapperida menyampaikan Paparan terkait Capaian Makro Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, Isu Strategis, Tema, Target Tujuan dan Sasaran RKPD serta Program Prioritas Tahun 2027.

Forum konsultasi publik juga memberikan ruang untuk masyarakat yang hadir secara daring maupun luring untuk menyampaikan masukan dan aspirasi terkait berbagai isu pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi daerah serta pengembangan sumberdaya manusia. Masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam forum ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu Forum Lintas Perangkat Daerah.

Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap proses penyusunan RKPD dapat berlangsung secara partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (ENR)



Forum Perangkat Daerah 2027, Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Renja PD Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Forum Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2026 di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara dan dihadiri oleh Instansi Vertikal dan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Forum Lintas Perangkat ini dibuka secara resmi oleh H.Dt.Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat 3 fokus pembangunan yang menjadi sasaran intervensi program oleh perangkat daerah yakni pembangunan wilayah yang merata, pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan ekonomi yang bernilai tambah.

Dalam Forum Lintas Perangkat Daerah ini, sebanyak 8 Perangkat Daerah memaparkan Rancangan Renjanya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam paparannya, perangkat daerah menyampaikan kebutuhan dukungan lintas perangkat daerah pada tahun 2027 dan kemudiaan perangkat daerah yang dituju menyampaikan konfirmasi kesiapannya. Kebutuhan dukungan lintas perangkat daerah diantaranya fasilitasi kerjasama antar daerah, mitigasi bencana, sinkronisasi konektivitas jalan paralel antara jalan nasional dan jalan provinsi, jaringan listrik dan penyediaan infrastruktur.

Melalui pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap setiap Perangkat Daerah dapat merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan lebih fokus dan tepat sasaran dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (ENR)





Sinergi Perencanaan Penanganan Jalan di Kawasan Apau Kayan

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rencana Penanganan Jalan di Kawasan Apau Kayan pada Jumat, 23 Januari 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Utara ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur dan dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta perangkat daerah terkait.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam merumuskan solusi penanganan jalan di Kawasan Apau Kayan, khususnya terkait dengan status dan perencanaan jaringan jalan. Kawasan Apau Kayan sebagai wilayah perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam pembahasan, Bapperida Provinsi Kalimantan Utara menyoroti pentingnya penguatan perencanaan jangka panjang jaringan jalan tahun 2025–2045 yang selama ini belum terkoordinasi secara optimal. Selain itu, perhatian juga diberikan pada perlunya penetapan status ruas jalan yang lebih komprehensif, mengingat masih banyak kawasan perbatasan selain Krayan yang membutuhkan pengembangan jaringan jalan. Lima ruas jalan strategis di Kawasan Apau Kayan diusulkan untuk mendukung aksesibilitas dan pengembangan wilayah, yaitu:

- Jalan Sei Jelarai – Sei Tebuhuk – Sei Kihan sebagai akses menuju kawasan penyangga pusat kegiatan wilayah rencana DOB Apau Kayan.
- Jalan Sei Jelarai – Long Payau – Long Ampung yang merupakan jalur poros dengan konektivitas yang telah dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun.
- Jalan Long Temuyat – Lubak Ungai yang memiliki potensi pengembangan energi terbarukan (PLTMH), pariwisata, dan pertanian. Jalan Long Ampung – Long Uro yang dapat memperpendek jarak tempuh masyarakat.
- Jalan Long Top – Long Sule hingga batas Kalimantan Timur sebagai akses alternatif kawasan perbatasan.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa beberapa ruas jalan tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung aktivitas pertanian, perkebunan, serta pengembangan pariwisata dan energi. Namun

demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis serta keberadaan kawasan hutan lindung pada sebagian besar ruas yang diusulkan.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam penanganan jalan, mengingat infrastruktur ini merupakan tulang punggung proses produksi dan distribusi masyarakat. Pembukaan akses jalan baru diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Apau Kayan.

Sementara itu, dari sisi ekonomi perbatasan, data menunjukkan aktivitas perdagangan di PLBN Long Nawang sepanjang tahun 2025 masih didominasi oleh impor kebutuhan pokok senilai Rp6,5 miliar, sementara ekspor produk lokal seperti hasil pertanian, gaharu, merica, dan ikan baru mencapai Rp295 juta. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan konektivitas jalan untuk mendorong daya saing produk lokal.

Dinas Kehutanan menambahkan bahwa sebagian besar ruas jalan yang diusulkan berada dalam kawasan hutan, sehingga diperlukan mekanisme perizinan melalui skema pinjam pakai kawasan hutan (PPKH) maupun perubahan fungsi kawasan. Hal ini menjadi aspek penting yang harus dipersiapkan secara matang dalam proses perencanaan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta perlunya tinjauan lapangan guna memastikan kondisi riil dari ruas-ruas yang diusulkan. Selain itu, penguatan aspek perencanaan jangka panjang dan legalitas melalui revisi RTRW serta peninjauan kembali SK Rencana Umum Jaringan Jalan menjadi langkah krusial.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati beberapa langkah strategis, antara lain peninjauan kembali dokumen perencanaan dan legalitas jaringan jalan, pendalaman kajian terhadap lima ruas jalan yang diusulkan, integrasi usulan ke dalam revisi RTRW, koordinasi teknis lanjutan lintas sektor dan penjadwalan survei lapangan untuk validasi kondisi eksisting.

Melalui koordinasi yang kuat dan perencanaan yang terintegrasi, diharapkan penanganan jalan di Kawasan Apau Kayan dapat segera direalisasikan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas wilayah perbatasan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara. (RSL)



Kondisi jalan yang menghubungkan desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu menuju Data Dian, Kecamatan Kayan Hilir, ditemukan sejumlah ruas jalan yang rusak parah. (dkisp)

Dorong Perlindungan Inovasi Lokal, Bapperida Percepat Pembentukan Sentra KI Daerah



> **Setiap ide inovatif dan produk unggulan daerah tidak hanya lahir, tetapi juga terlindungi secara hukum dan memiliki nilai ekonomi yang jelas.**
>
> **Bertius, S. Hut**
> Kepala Bapperida Prov. Kaltara

Tanjung Selor - Sebagai lembaga yang memegang mandat perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah, Bapperida secara proaktif mengambil peran sentral dalam memperkuat infrastruktur perlindungan kekayaan intelektual (KI) di wilayah Kalimantan Utara melalui kolaborasi terstruktur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

Langkah konkret ini diwujudkan dengan percepatan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, mulai dari konsultasi awal, pendaftaran administratif, hingga pendampingan komersialisasi bagi para inovator, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta akademisi di daerah. Inisiatif ini bukan sekadar perluasan layanan birokrasi, melainkan bagian integral dari peta jalan

perencanaan pembangunan inovasi yang disusun Bapperida Kaltara untuk memastikan bahwa setiap produk unggulan, karya budaya, dan temuan teknologi lokal mendapatkan payung hukum yang kuat sekaligus memiliki daya saing ekonomi yang berkelanjutan di pasar regional maupun nasional.

Komitmen tersebut secara resmi dimatangkan dalam pertemuan yang digelar di Tanjung Selor, pada Selasa (10/3), yang menghadirkan delegasi teknis dari Kanwil Kemenkumham Kaltim pimpinan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hanton Hazali. Dalam forum tersebut, Bapperida Kaltara diwakili langsung oleh Kepala Badan Bertius, didampingi Kepala Bidang Riset dan Inovasi Mochamad Sarkawi beserta jajaran staf.

Kedua instansi sepakat bahwa pendekatan yang dilakukan harus bersifat holistik dan partisipatif, sehingga tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas pendaftaran, tetapi juga pada pendalaman literasi, fasilitasi jaringan pemasaran, serta penguatan ekosistem inovasi yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Utara.

Kepala Bapperida Kaltara, Bertius, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan bertindak sebagai katalisator utama dalam mendorong ekosistem inovasi daerah yang terencana dan berdaya saing. Menurutnya, keberadaan Sentra KI merupakan implementasi konkret dari mandat perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah, sekaligus jawaban atas tantangan rendahnya tingkat pendaftaran hak cipta, merek, paten, dan indikasi geografis yang selama ini masih menjadi hambatan struktural bagi pelaku ekonomi kreatif dan industri lokal.

“Bapperida Kaltara berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap ide inovatif dan produk unggulan daerah tidak hanya lahir, tetapi juga terlindungi secara hukum dan memiliki nilai ekonomi yang jelas. Kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Kaltim adalah langkah awal yang strategis, dan ke depan kami akan mengintegrasikan layanan ini ke dalam program pendampingan UMKM, klaster industri, serta pusat unggulan riset daerah,” ungkap Bertius dengan tegas.



Hanton Hazali selaku perwakilan Kemenkumham Kaltim menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Bapperida Kaltara yang dinilai sangat progresif dan terstruktur, serta menegaskan kesiapan institusinya untuk menyediakan tenaga ahli, materi sosialisasi, dan dukungan sistem informasi yang terintegrasi dengan jaringan nasional.

“Kami melihat Bapperida Kaltara telah memposisikan diri sebagai ujung tombak dalam mempercepat transformasi inovasi daerah menjadi aset ekonomi yang bernilai. Dukungan penuh dari sisi pelayanan hukum akan kami berikan, termasuk melalui pendampingan teknis, verifikasi dokumen, serta fasilitasi pertemuan bisnis bagi pemilik KI yang siap melakukan ekspansi pasar,” jelasnya.

Dengan penguatan peran strategis ini, Bapperida Kaltara optimis bahwa Sentra KI tidak hanya akan berfungsi sebagai layanan administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi berbasis pengetahuan yang mampu menarik minat investor, mendorong hilirisasi hasil riset, serta memperkuat identitas produk lokal Kalimantan Utara di kancah nasional.

Melalui pendekatan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, Bapperida Kaltara menegaskan komitmennya untuk menjadikan perlindungan kekayaan intelektual sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah yang berkelanjutan di era persaingan global.(AS)



Transformasi Hasil Studi PERA Menjadi *Policy Brief* untuk Perkuat Kemandirian Fiskal

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama Program SKALA resmi menggelar *Workshop* Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Berbasis Hasil Studi *Public Expenditure and Revenue Analysis* (PERA) di Hotel Luminor, Tanjung Selor, pada 11–12 Februari 2026. Kegiatan yang menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil ini secara resmi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, SE, M.Si.

Workshop ini menjadi momentum strategis untuk mentransformasi temuan kajian fiskal menjadi rekomendasi kebijakan konkret, sekaligus mendorong kemandirian keuangan daerah melalui perencanaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Dr. Bustan menekankan bahwa tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan menuntut adanya pergeseran paradigma pengelolaan keuangan daerah. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk lebih cermat dan selektif dalam menetapkan prioritas belanja agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak berganda yang nyata bagi masyarakat.

Penguatan tata kelola fiskal, menurutnya, tidak sekadar berfokus pada efisiensi pengeluaran, melainkan juga bagaimana perencanaan keuangan mampu menjawab kebutuhan riil pelayanan dasar dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta aspek Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). “Studi PERA memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi fiskal daerah. Hasil analisis ini wajib kita transformasikan menjadi rekomendasi kebijakan

yang terukur melalui penyusunan *policy brief* berkualitas, agar perencanaan pembangunan ke depan lebih berbasis data dan tepat sasaran," tegasnya.

Workshop ini merupakan tindak lanjut strategis dari penyelesaian Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (PERA) yang telah diselesaikan Bapperida Kaltara pada tahun 2025. Sebagai lembaga perencanaan dan riset daerah, Bapperida memposisikan diri sebagai koordinator utama dalam memastikan temuan studi tidak hanya berhenti pada tataran akademik, melainkan dioperasionalkan menjadi instrumen advokasi kebijakan yang terstruktur.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci, di antaranya Kepala Bapperida Kaltara Bertius, S.Hut, perwakilan Direktorat Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (P2D) DJPK Kementerian Keuangan Moza Pandawa Sakti, serta peneliti senior LPEM Universitas Indonesia, Khoirunurrofik. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memberikan perspektif multidisiplin dalam menyusun kerangka kebijakan fiskal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan karakteristik wilayah perbatasan.

Pada sesi pemaparan data, Khoirunurrofik mengungkap temuan krusial bahwa meskipun belanja per kapita Kalimantan Utara untuk sektor pendidikan dan kesehatan tercatat di atas rata-rata nasional, tingkat efisiensi penggunaannya masih memerlukan optimalisasi signifikan. "Kami mengidentifikasi disparitas yang cukup lebar dalam efisiensi belanja antar kabupaten/kota, khususnya pada fungsi infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Pola alokasi yang belum merata ini menjadi catatan penting untuk perbaikan struktur anggaran ke depan," jelasnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, agenda hari kedua workshop difokuskan pada penulisan *policy brief* secara intensif dengan pendampingan langsung dari tim ahli Program SKALA dan LPEM UI. Dokumen kebijakan terpilih akan dipublikasikan secara nasional melalui jurnal ilmiah Lembaga Administrasi Negara (LAN) sekaligus menjadi dasar advokasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltara dalam menyusun APBD yang lebih responsif dan akuntabel.

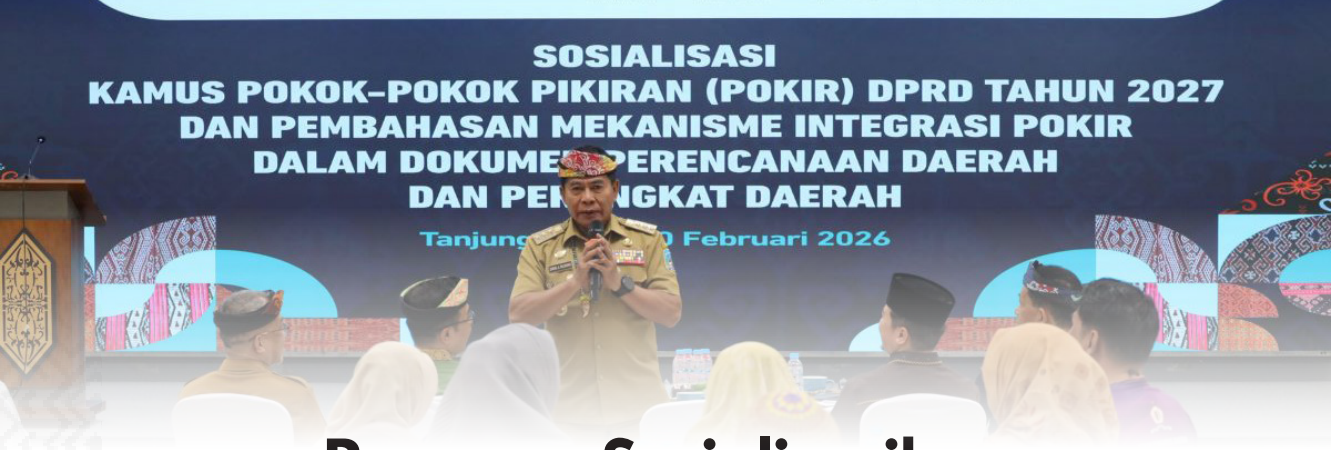
Melalui inisiatif ini, Bapperida Kaltara berkomitmen untuk mengawal implementasi rekomendasi kebijakan secara berkelanjutan, mulai dari sosialisasi hasil *policy brief* kepada para pembuat anggaran di tingkat kabupaten/kota hingga monitoring dampaknya terhadap indikator kinerja fiskal daerah. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang inklusif di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi multipihak, Kaltara optimis dapat mengurangi ketergantungan fiskal secara bertahap sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. (AS)

"Perangkat daerah untuk lebih cermat dan selektif dalam menetapkan prioritas belanja agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak berganda yang nyata bagi masyarakat"

DR. BUSTAN, SE., M.SI
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDAPROV. KALIMANTAN UTARA





Pemprov Sosialisasikan Kamus Pokir DPRD 2027

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bekerja sama dengan Program SKALA menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kamus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027 dan Pembahasan Mekanisme Integrasi Pokir dalam Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah pada Selasa (10/2) di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kalimantan Utara.

Kegiatan diawali dengan Sambutan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H.Achmad Djufrie, SE, MM yang dalam sambutannya menyampaikan komitmen DPRD Prov.Kaltara untuk melaksanakan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi kepentingan publik.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan acara oleh Gubernur Kalimantan Utara. Dalam arahannya Gubernur menyampaikan 8 Program Unggulan Gubernur periodesasi 2025-2029, Keterbatasan Fiskal Kaltara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta Regulasi yang mengatur pengusulan dan verifikasi pokok-pokok pikiran DPRD.

Setelah sesi pembukaan, *Provincial Lead* SKALA Kalimantan Utara Bapak Nurul Affandy menyampaikan dukungan Program SKALA dalam penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan Paparan oleh Kepala Bapperida terkait Kamus Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2027 serta mekanisme integrasi Pokir dalam dokumen perancanaan daerah dan perangkat daerah.

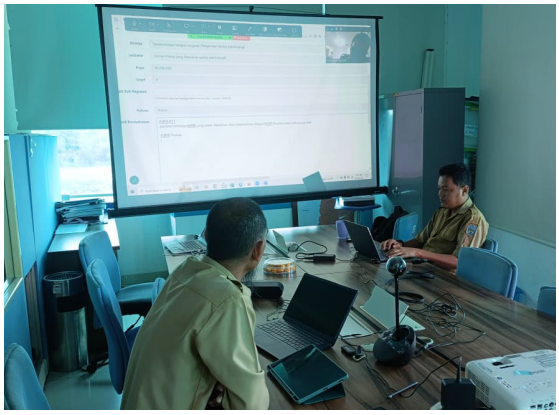
Materi terakhir disampaikan oleh Inspektur Daerah mengenai ruang lingkup *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Setelah sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Bapak H.Sapi'i, ST, M.AP dan menghadirkan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam sesi ini, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terkait integrasi Pokir DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, Kepala Perangkat Daerah juga diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan terhadap berbagai masukan yang disampaikan dalam sesi diskusi. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan pembacaan dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung proses integrasi Pokir DPRD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan transparan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman bersama antara DPRD dan pemerintah daerah mengenai mekanisme integrasi Pokir dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga proses pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih partisipatif, akuntabel dan terarah sesuai Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027. (ENR)





Rakortekrenbang 2026 Perkuat Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

Tanjung Selor - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026 resmi digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diselenggarakan pada Rabu (25/2), kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rakortekrenbang 2026 tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi teknis, melainkan menjadi langkah konkret dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN), guna memastikan arah kebijakan yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan tahun ini mengadopsi mekanisme pembahasan melalui 36 Desk Urusan Konkuren, 19 Desk Program Strategis Nasional (ProSN), dan 6 Desk Tematik Pembangunan yang diikuti oleh unsur pemerintah pusat, kementerian/lembaga terkait, serta perwakilan Bapperida dan perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Diskusi teknis yang berlangsung secara daring ini memungkinkan setiap daerah menyelaraskan program prioritasnya dengan arahan nasional, sekaligus memastikan kesiapan data dukung dan sumber daya yang tepat sasaran sesuai kewenangan masing-masing urusan.

Sinkronisasi dokumen perencanaan dalam Rakortekrenbang 2026 menjadi fondasi krusial untuk menjamin penganggaran yang efektif dan akuntabel. Seluruh kesepakatan yang dirumuskan melalui aplikasi SIPD Tahun 2026 wajib ditindaklanjuti dalam rangkaian Musrenbang di tingkat daerah maupun nasional.

Hasil pembahasan ini akan menjadi bahan substansi utama dalam penyusunan Pedoman RKPD 2027, Pedoman APBD 2027, serta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, sehingga proses perencanaan pembangunan dapat berjalan berkesinambungan, terukur, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. (AS)

Mentari Kaltara 2026 : Ruang Suara Kelompok Rentan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang inklusif melalui pelaksanaan Musrenbang Tematik Forum Mentari Kaltara (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif di Kalimantan Utara) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (9/3). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memastikan bahwa suara kelompok rentan benar-benar terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Forum ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., yang dalam arahannya menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial dalam setiap kebijakan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.

"Pemerintah daerah harus memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Forum ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat, khususnya kelompok rentan," tegasnya saat membuka kegiatan.

Pelaksanaan Forum Mentari Kaltara 2026 merupakan bagian dari upaya sistematis Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat partisipasi Jaringan Masyarakat Sipil (JMS). Hal ini sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan yang semakin

menekankan pendekatan partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan rangkaian pembukaan yang mencakup menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kaltara, doa bersama, serta sambutan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan DPRD dan mitra pembangunan. Suasana semakin hidup dengan penampilan dari Jaringan Masyarakat Sipil Kaltara yang menggambarkan semangat inklusivitas dan keberagaman.

Salah satu momen penting dalam pembukaan adalah penyerahan simbolis aspirasi dari perwakilan JMS kepada Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Kepala Bapperida. Penyerahan ini menjadi simbol bahwa aspirasi masyarakat bukan hanya didengar, tetapi juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.

Memasuki sesi inti, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Utara memaparkan arah kebijakan serta isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Paparan ini memberikan gambaran umum mengenai prioritas pembangunan sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya, forum dibagi ke dalam beberapa sesi tematik yang menghadirkan perwakilan dari berbagai kelompok rentan. Sesi pertama diawali dengan penyampaian aspirasi dari kelompok anak, yang menyoroti pentingnya akses pendidikan yang merata, ruang bermain yang aman, serta perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Sesi kedua diisi oleh perwakilan perempuan yang mengangkat isu pemberdayaan ekonomi, perlindungan terhadap perempuan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Aspirasi ini mendapat tanggapan langsung dari perangkat daerah terkait, yang memberikan penjelasan mengenai program dan kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan.

Pada sesi ketiga, kelompok disabilitas menyampaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari aksesibilitas fasilitas publik hingga kesempatan kerja yang masih terbatas. Diskusi dalam sesi ini berlangsung dinamis, menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih ramah disabilitas.

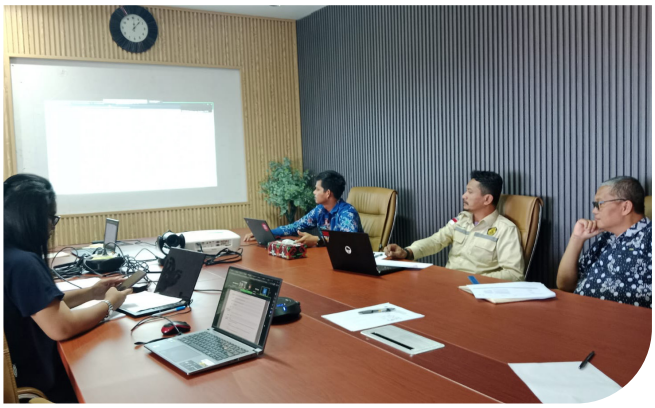
Sesi berikutnya menghadirkan kelompok lansia yang menekankan pentingnya jaminan sosial, layanan kesehatan yang memadai, serta ruang partisipasi bagi lansia dalam kehidupan sosial. Sementara itu, sesi terakhir menjadi ruang bagi kelompok adat dan kelompok rentan lainnya untuk menyampaikan aspirasi terkait perlindungan hak-hak adat, pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan identitas budaya lokal.

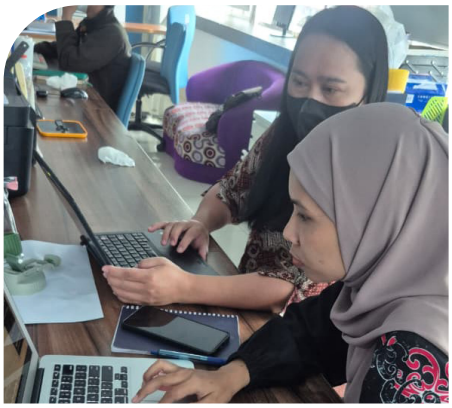
Seluruh rangkaian sesi ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga ruang dialog konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Setiap masukan yang disampaikan langsung mendapat tanggapan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif.

Sebagai penutup, dilakukan pembacaan dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil forum. Kegiatan kemudian ditutup dengan harapan bahwa seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Forum Mentari Kaltara 2026 tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga refleksi dari upaya nyata pemerintah dalam membangun daerah yang inklusif dan berkeadilan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, khususnya kelompok rentan, diharapkan pembangunan di Kalimantan Utara ke depan semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh suara didengar dan dipertimbangkan. Komitmen ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang setara, inklusif, dan berdaya saing. (ROM)





Selaraskan Target Prioritas Pembangunan, Pemprov Kaltara Gelar Rakortekrenbang 2026

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Tahun 2026 secara daring pada 30 Maret hingga 2 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung melalui platform Zoom Meeting ini diikuti oleh Perangkat Daerah Provinsi, perwakilan Bapperida, serta perangkat daerah terkait dari lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Sebagai forum strategis tahunan, Rakortekrenbang menjadi wadah utama untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional, sekaligus menjadi langkah krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Rakortekrenbang 2026 difokuskan pada pembahasan teknis indikator urusan pemerintahan melalui berbagai desk yang dipandu langsung oleh kementerian/lembaga terkait. Proses sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan ini menjadi kunci dalam memastikan setiap program, kegiatan, dan lokasi pembangunan telah selaras dengan target strategis nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN). Melalui diskusi mendalam antarunsur pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, seluruh peserta berupaya merumuskan indikator kinerja yang terukur serta menjamin penganggaran yang tepat sasaran, sehingga dokumen perencanaan daerah dapat berjalan akuntabel dan berdampak nyata.

Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kabupaten/kota sebagai pilar utama pelaksana pembangunan di tingkat lokal. Seluruh perangkat daerah provinsi diminta memberikan atensi penuh terhadap setiap usulan dan data dukung dari kabupaten/kota guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Dengan komitmen bersama dan koordinasi yang solid, Rakortekrenbang 2026 diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kalimantan Utara yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (AS)

Pelita PUPE:
Menguatkan Literasi Anak Punan Pesisir di Desa Apung

Kategori Masyarakat - Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025

Akses pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, namun pada kenyataannya masih ada kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan kesempatan tersebut. Salah satunya adalah komunitas Punan pesisir yang tinggal di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Sebagian besar masyarakat Punan pesisir masih menjalani kehidupan dengan mata pencaharian tradisional seperti mencari ikan dan udang di sungai. Kondisi tersebut membuat akses terhadap pendidikan menjadi terbatas. Banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau bahkan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar, tidak sedikit pula yang belum mampu membaca dan menulis.

Berangkat dari kondisi tersebut, Agus Yahya, Siti Hajar dan Siti Aminah para inovator, bersama Yayasan Lentera Sei Kayan dan para relawan menginisiasi sebuah program bernama PELITA PUPE (Penguatan Literasi dan Akses Belajar Punan Pesisir). Program ini berfokus pada peningkatan kemampuan literasi sekaligus membuka akses belajar bagi anak-anak Punan pesisir. Para relawan memulai kegiatan belajar melalui pondok belajar yang khusus digunakan anak-anak komunitas Punan pesisir.

Program pondok belajar ini mulai menunjukkan hasil yang positif, anak-anak yang sebelumnya belum bisa membaca kini telah mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan, 100 persen peserta belajar usia sekolah dasar hingga menengah kini sudah mampu membaca dan menulis. Perubahan juga terlihat dari kebiasaan sehari-hari anak-anak.

Pelaksanaan program PELITA PUPE tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, Selain relawan dan komunitas, program ini juga mendapat dukungan di antaranya PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, Komunitas Sahabat Milenial, Komunitas Sedekah Seribu, Panen Group Swalayan, Polwan Polda Kalimantan Utara, serta BNI Cabang Tanjung Selor, dan berbagai donatur lainnya yang peduli terhadap pendidikan anak-anak Punan pesisir.

Kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Program PELITA PUPE menjadi contoh bagaimana pendekatan yang sederhana, dekat dengan masyarakat, dan dilakukan secara kolaboratif dapat membuka jalan bagi anak-anak di komunitas marginal untuk mendapatkan hak pendidikan yang lebih baik.







Menanam Harapan dari Kolam Buatan:
Inovasi BAMT untuk Pesisir

Kategori Masyarakat - Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025

Wilayah pesisir Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, saat ini ibarat garis pertahanan yang perlahan terkikis. Abrasi yang terus terjadi bukan hanya menggerus daratan, tetapi juga melemahkan "benteng alami" berupa ekosistem pesisir yang selama ini melindungi kehidupan di sekitarnya. Selama ini, mangrove dikenal sebagai tameng alami pantai. Namun dalam praktiknya, menumbuhkan mangrove tidak semudah menanam di daratan biasa. Pembibitan sering kali seperti bertaruh dengan alam, pasang surut yang tidak menentu, lokasi yang sulit dijangkau, hingga gangguan hama membuat banyak bibit gagal tumbuh.

Di sinilah Muhammad Tigo Gunawan dengan inovasi Bunyu *Artificial Mangrove Tide* (BAMT) hadir sebagai pendekatan baru. Jika sebelumnya pembibitan sangat bergantung pada "mood" alam, BAMT mencoba mengambil kendali dengan membuat kolam pasang surut buatan. Ibarat menyediakan "rumah tumbuh" yang lebih nyaman, bibit mangrove bisa berkembang dalam kondisi yang lebih terjaga. Teknologi yang digunakan pun tidak rumit.

Dengan bantuan *siphon bell* untuk mengatur aliran air, serta media tanam dari bahan lokal seperti pasir, tanah, kompos, dan akar pakis, BAMT menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus mahal atau kompleks. Justru dengan pendekatan sederhana yang sesuai kondisi lokal, hasilnya bisa lebih efektif.

Hasilnya pun cukup mencolok. Tingkat keberhasilan pembibitan bisa mencapai hampir 100 persen, dan waktu tumbuhnya lebih cepat sekitar satu bulan dibanding cara biasa. Artinya, hambatan utama





dalam menumbuhkan mangrove mulai bisa diatasi. Namun, seperti menanam pohon, keberhasilan tidak berhenti di awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Tanpa dukungan pendampingan, pengelolaan yang baik, dan kebijakan yang tepat, inovasi ini berisiko hanya menjadi "contoh bagus" tanpa dampak luas.

BAMT sendiri sudah mendapatkan pengakuan resmi melalui paten sederhana (ID S000008317). Ini menunjukkan bahwa inovasi ini bukan sekadar ide, tetapi sudah terbukti dan diakui secara hukum. Lebih jauh lagi, BAMT juga membuka peluang baru bagi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, pembibitan mangrove bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Dengan kata lain, mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai, tetapi juga bisa menjadi "akar ekonomi" baru bagi masyarakat pesisir.

BAMT mengingatkan kita bahwa menjaga pesisir bukan hanya soal melawan abrasi, tetapi juga tentang merawat masa depan. Seperti menanam mangrove, hasilnya mungkin tidak instan, tetapi akarnya akan menguatkan kehidupan dalam jangka panjang.

Long Line Lebih Bersih, Panen Lebih Maksimal:
Inovasi untuk Petani Rumput Laut

Kategori Masyarakat - Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025

Rumput laut sudah menjadi salah satu ciri khas sekaligus andalan ekonomi pesisir di Kalimantan Utara. Hamparannya tidak hanya memberi warna di perairan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Di balik itu, ada kerja keras para petani yang setiap hari merawat agar rumput laut dapat tumbuh dengan baik.

Dalam proses budidayanya, tali bentang menjadi bagian penting, ibarat "tempat tinggal" bagi rumput laut untuk tumbuh dan berkembang. Namun, seiring waktu, tali ini sering dipenuhi lumut, kotoran, dan organisme laut lain yang dapat menghambat pertumbuhan.

Membersihkan tali bentang bukan pekerjaan ringan. Selama ini, petani harus melakukannya secara manual, seperti membersihkan sesuatu yang cepat kotor kembali. Proses ini memakan waktu, menguras tenaga, dan tidak jarang berisiko, baik karena benda tajam maupun kondisi perairan. Kondisi ini banyak dirasakan oleh para pembudidaya di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, salah satu sentra utama rumput laut di Kalimantan Utara. Di wilayah ini, rumput laut bukan sekadar komoditas, tetapi menjadi denyut kehidupan masyarakat pesisir.

Melihat tantangan tersebut, seorang inovator dari Nunukan, Pak Robiansyah, menghadirkan solusi melalui pengembangan alat pembersih tali bentang rumput laut. Alat ini dirancang untuk membantu petani agar proses pembersihan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan tidak terlalu menguras tenaga. Pengembangannya juga didukung oleh GIZ Jerman melalui kerja sama pembangunan, sehingga alat yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan, sederhana, mudah digunakan, dan tepat guna.

Manfaatnya mulai dirasakan. Waktu kerja menjadi lebih efisien, tenaga yang dikeluarkan lebih ringan, dan risiko kerja dapat ditekan. Ibarat mengganti cara lama yang berat dengan alat bantu yang lebih cerdas, petani kini bisa lebih fokus meningkatkan hasil budidaya mereka. Inovasi ini menunjukkan bahwa solusi sederhana bisa membawa perubahan besar. Tidak hanya membantu pekerjaan petani, tetapi juga memperkuat sektor budidaya rumput laut sebagai salah satu penopang ekonomi daerah di Kabupaten Nunukan.



BELAJAR DARI GAMBUT:

Memperkuat Peran Generasi Muda dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut

GIZ

Bagaimana generasi muda dapat berperan dalam menjaga ekosistem gambut? Pertanyaan ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Melalui pendidikan yang tepat, generasi muda tidak hanya memahami pentingnya gambut, tetapi juga terdorong untuk berperan aktif dalam menjaga kelestariannya.

Kesadaran yang ditanamkan sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan ketertarikan serta wawasan terhadap isu gambut yang sering kali dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Berangkat dari pemikiran tersebut, GIZ mendukung pengembangan modul pembelajaran tentang ekosistem gambut yang ditujukan bagi siswa SMP dan SMA di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, sebagai upaya memperkenalkan dan menumbuhkan kepedulian mereka terhadap ekosistem gambut.

Suasana kelas di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, Kalimantan Utara, siang itu terasa berbeda dari biasanya. Di antara deretan meja dan kursi kelas, seorang siswa berdiri sambil memegang mikrofon dan mencoba menjawab pertanyaan dari pemateri di depan kelas. Interaksi antara siswa dan pemateri terjadi dan didukung oleh materi yang disusun secara khusus pada layar. Para siswa tidak sedang mengikuti pelajaran biasa.



Uji coba modul pembelajaran di SMK Tanjung Palas (Foto ©GIZ/Resita)

Mereka sedang belajar mengenal ekosistem gambut, sebuah topik yang bagi sebagian besar dari mereka masih terdengar baru. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari uji coba bahan ajar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dilaksanakan pada 12 Februari 2026 di SMK Negeri 1 Tanjung Palas.

Program ini merupakan salah satu inisiatif yang didukung oleh GIZ untuk memperkenalkan pengetahuan tentang gambut kepada siswa sekolah menengah di Kalimantan Utara. Kegiatan ini juga ditinjau oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Sebelumnya, pada 23 Oktober 2025 dilaksanakan lokakarya bagi para guru sekolah menengah yang berada dalam wilayah KHG. Setidaknya terdapat 17 SMA/SMK dan 27 SMP yang berada di desa dalam area KHG di Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung. Dalam kesempatan tersebut, masukan diberikan terhadap rancangan modul pembelajaran yang akan diintegrasikan dalam kurikulum yang ada.

Modul pembelajaran inovatif berbasis konteks disusun agar dapat dipetakan dalam materi kompetensi inti yang relevan seperti biologi, kimia, fisika dsb. Tidak terbatas pada bidang ilmu hayati melalui pembahasan karakteristik biofisik serta keragaman hayati pada ekosistem gambut, modul yang dikembangkan juga mencakup aspek sosial terkait kearifan lokal masyarakat.

Rangkaian kegiatan pengembangan modul pembelajaran tentang ekosistem gambut ini diharapkan dapat menghasilkan materi pembelajaran yang menarik melalui ilustrasi maupun video tematik. Interaksi dengan murid berjalan baik saat uji coba dilaksanakan. Meskipun wilayah Tanjung Palas tidak berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut, beberapa



Lokakarya bagi para guru sekolah menengah di Tanjung Selor (Foto ©GIZ/Komang Sukadana)

siswa ternyata pernah melihat tanah gambut di kampung halaman mereka.

Ketika pemateri menunjukkan contoh tanah gambut dan menjelaskan ciri-cirinya, beberapa siswa berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Di akhir kegiatan, para siswa diminta memberikan masukan terhadap bahan ajar yang telah diuji coba. Banyak siswa menyampaikan bahwa praktik langsung, diskusi kelas, serta penggunaan video membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Para siswa sangat tertarik dengan proses belajar interaktif yang mengedepankan kerja kelompok dan praktikum.

Pengembangan pusat informasi secara lebih luas terkait ekosistem gambut juga tengah dirancang di level provinsi. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses informasi bagi masyarakat umum tentang ekosistem gambut dan mangrove di Kalimantan Utara. Dengan harapan pemahaman akan ekosistem gambut dan mangrove akan tumbuh dan berkembang menjadi kesadaran akan pentingnya ekosistem tersebut bagi pembangunan di Kalimantan Utara. (GIZ)

SEKILAS INFO

Kepala Bapperida Bertius S. Hut mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dalam pemaparan Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2026. Gubernur meminta seluruh OPD memaparkan program prioritas tahun anggaran 2026 guna memastikan percepatan realisasi pembangunan serta optimalisasi anggaran daerah. (6/1)

Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Yatno Supriadi SE menjadi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelestarian kearifan lokal Kalimantan Utara. (12/2)







Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara H. Denny Harianto, S.E., M.M. melaksanakan kunjungan kerja ke Bapperida Kaltara (9/1). Dalam kunjungan tersebut, Sekprov memberikan arahan dan motivasi kerja kepada seluruh pegawai Bapperida agar terus meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan dalam mendukung tugas pemerintahan daerah.



Kabid. Sosial, Budaya dan Pemerintahan Mufied Azwar, S.PT membuka Lokakarya Penguatan Literasi Data Jaringan Masyarakat Sipil (13/2). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas JMS dalam membaca, memahami, dan memanfaatkan data sebagai dasar advokasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.



KEBIJAKAN ENERGI TATA KELOLA BIROKRASI PERENCANAAN WILAYAH

Dari Selat Hormuz ke Ruang Daerah

Transformasi Energi, Birokrasi, dan Pola Mobilitas

Eskalasi konflik di Selat Hormuz memicu gelombang efisiensi energi yang mengalir dari Washington hingga Tanjung Selor, mengubah cara birokrasi bekerja, cara kota bergerak, dan cara daerah membangun ketahanan dari dalam.

Retno Sawitri Listyabratarini
Perencana Ahli Pertama - Bapperida Provinsi Kalimantan Utara

Dinamika geopolitik global kembali menunjukkan betapa rentannya sistem energi dunia terhadap konflik kawasan. Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran telah mencapai titik paling mengkhawatirkan, potensi penutupan Selat Hormuz menjadi pengingat bahwa jalur distribusi energi global sangat bergantung pada titik-titik sempit *(chokepoints)* yang rentan secara politik dan militer.

SELAT HORMUZ: URAT NADI ENERGI DUNIA

± ⅓ perdagangan minyak global melewati jalur ini setiap harinya. Gangguan di Hormuz berdampak langsung: lonjakan harga BBM, tekanan fiskal daerah, dan penyesuaian kebijakan publik hingga ke level terkecil pemerintahan.

Dampak Global, Respons Lokal

Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung pada stabilitas energi, merespons ancaman ini melalui serangkaian kebijakan efisiensi di level birokrasi. Lonjakan biaya operasional akibat krisis energi global menuntut pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran.

Pemerintah pusat melalui SE Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 menetapkan pola kerja baru bagi ASN: 4 hari kerja di kantor (WFO) dan 1 hari kerja di rumah (WFH) setiap Jumat. Kebijakan ini dipertegas oleh Mendagri melalui SE Nomor 800.1.5/3349/SJ yang menginstruksikan seluruh kepala daerah mengadopsi pola serupa demi menekan konsumsi BBM, listrik, dan air di kantor pemerintahan.

SE GUBERNUR KALTARA

WFA

Efektif 6 Maret 2026 — setiap hari Jumat untuk seluruh ASN yang memenuhi kriteria

Jauh sebelum konflik AS–Iran terjadi, Pemprov Kalimantan Utara telah menerbitkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap Jumat melalui SE Gubernur Nomor 000.8/2/BO/GUB tertanggal 24 Februari 2026, efektif diterapkan sejak 6 Maret 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi operasional dan penghematan Anggaran Daerah di tengah pengetatan ruang fiskal oleh Pemerintah Pusat.

REGULASI PENDUKUNG

SE Menteri PANRB No. 3 / 2026
Pola Kerja 4 WFO + 1 WFH (Jum'at) untuk seluruh ASN Pusat

SE Mendagri No. 800.1.5/3349/SJ
Instruksi kepada seluruh Gubernur dan Bupati Walikota untuk adopsi pola serupa

DAMPAK LANGSUNG WFA

- Penurunan konsumsi BBM Operasional kantor
- Penghematan listrik dan air gedung pemerintahan
- Pengurangan emisi karbon
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas

Setelah konflik AS–Iran terjadi, upaya Pemprov Kaltara ini bukan hanya respons administratif, tetapi bagian dari strategi adaptasi terhadap dinamika global yang berdampak pada sektor energi. Melalui WFA, mobilitas harian ASN berkurang, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan konsumsi BBM.

Transformasi Budaya ASN: Dari Kehadiran ke Kinerja

WFA bukan sekadar memindahkan lokasi kerja, tetapi harus diikuti dengan perubahan pola kerja menjadi berbasis kinerja dan output. Transformasi ini menekankan pergeseran paradigma dari pola kerja berbasis kehadiran fisik menuju sistem yang lebih fleksibel, terukur, dan profesional.

Fleksibilitas kerja seperti WFA bukan sekadar kemudahan, tetapi tuntutan profesionalisme yang lebih tinggi. ASN dituntut tetap produktif, adaptif terhadap teknologi, serta mampu menjaga kualitas layanan publik meskipun tidak selalu berada di kantor.

Efektivitasnya sangat bergantung pada tiga faktor: proporsi pekerjaan yang benar-benar dapat dilakukan secara remote, tingkat kepatuhan ASN terhadap mekanisme kerja berbasis output, dan infrastruktur digital yang memadai.

Pergeseran dari *presence based* ke *performance based* ini menandai perubahan mendasar dalam cara birokrasi memaknai ruang kerja dari ruang fisik kantor menuju ruang kerja digital yang lebih cair dan fleksibel. Ini bukan hanya kebijakan administratif, tetapi instrumen strategis menuju birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

> "Dari Selat Hormuz hingga ke Tanjung Selor, terlihat jelas bahwa dinamika global memiliki implikasi nyata terhadap kebijakan lokal dan kehidupan sehari-hari."



> "Kunci keberhasilan WFA bukan pada lokasi kerja, tetapi pada sistem pengukuran kinerja yang terukur, berbasis data, dan dilengkapi dashboard monitoring real-time."

PARADIGMA BARU

Output-Based

Dari kehadiran fisik menuju kerja berbasis kinerja dan hasil yang terukur

KLASIFIKASI PEKERJAAN ASN

Fully Remote	Administratif Perencanaan, Analisis
Hybrid	Koordinasi dan tugas lapangan
On - Site	Pelayanan publik, kesehatan, infrastruktur

RISIKO YANG PERLU DIANTISIPASI

- Penurunan disiplin kerja jika pengawasan lemah
- Ketimpangan kinerja antar unit organisasi
- *Digital divide,* tidak semua ASN memiliki fasilitas memadai di rumah
- *Shifting cost:* beban listrik/internet bergeser ke individu

Implikasi terhadap Ruang dan Pola Mobilitas Daerah

Perubahan kebijakan dan budaya kerja tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada ruang wilayah dan pola aktivitas masyarakat. Setidaknya empat perubahan struktural sedang berlangsung bersamaan.

Pertama, terjadi penurunan intensitas pergerakan harian, khususnya pada hari pelaksanaan WFA. Hal ini berpotensi mengurangi beban lalu lintas, konsumsi BBM, serta emisi karbon di kawasan perkotaan.

Kedua, muncul redefinisi ruang kerja. Rumah, ruang publik, hingga ruang terbuka menjadi bagian dari ekosistem kerja baru, membuka peluang perencanaan kota yang lebih fleksibel dan berbasis aktivitas, bukan semata zonasi konvensional.

Ketiga, kebijakan ini mendorong pergeseran pola mobilitas menuju alternatif yang lebih berkelanjutan. Aktivitas seperti berjalan kaki dan bersepeda mulai mendapatkan ruang sebagai bagian dari keseharian, terutama untuk perjalanan jarak pendek.

4 PERUBAHAN STRUKTURAL

Ruang Kota

Mobilitas, ekosistem kerja, tata ruang, dan energi kota sedang bertransformasi bersamaan

INTEGRASI KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN

- Penguatan transportasi publik perkotaan
- Promosi mobilitas non-BBM: sepeda & jalan kaki
- Pengaturan jam kerja fleksibel, kurangi *peak hour*
- Evaluasi riil dampak terhadap konsumsi BBM berbasis data

DAMPAK JANGKA PANJANG TATA RUANG

Dari: terpusat *(centralized office)*

↓

Menuju: terdistribusi, pola aktivitas yang lebih merata di seluruh wilayah kota

Keempat, dalam jangka panjang, dapat terjadi perubahan struktur ruang kota, di mana ketergantungan terhadap pusat aktivitas tunggal *(centralized office)* berkurang dan digantikan oleh pola yang lebih terdistribusi, mengubah wajah kota secara fundamental.

Membangun Ketahanan dari Daerah

Krisis energi global, seperti yang dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz, menunjukkan bahwa daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada stabilitas eksternal. Diperlukan upaya membangun ketahanan dari dalam, salah satunya melalui efisiensi energi dan transformasi sistem kerja yang sistematis.

Kebijakan WFA dan transformasi budaya ASN merupakan langkah awal yang penting. Namun, untuk memberikan dampak yang lebih luas, perlu diintegrasikan dengan kebijakan lain: pengembangan transportasi ramah lingkungan, penataan ruang kota yang inklusif, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan energi.

AGENDA KETAHANAN ENERGI DAERAH

1. Perkuat sistem monitoring kinerja ASN berbasis output dengan *dashboard digital real-time*
2. Klasifikasi tegas pekerjaan ASN: *fully remote, hybrid,* dan *on site mandatory*
3. Integrasikan WFA dengan kebijakan transportasi publik dan mobilitas non-BBM
4. Bangun infrastruktur digital merata agar ASN di seluruh wilayah dapat berpartisipasi
5. Lakukan evaluasi berkala berbasis data riil: dampak BBM, produktivitas, dan kualitas layanan publik

"Dari Selat Hormuz hingga ke Tanjung Selor, terlihat jelas bahwa dinamika global memiliki implikasi nyata terhadap kebijakan lokal dan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, ruang wilayah tidak lagi sekadar wadah aktivitas, tetapi juga arena adaptasi terhadap perubahan global."

Transformasi yang sedang berlangsung dalam sistem energi, budaya kerja, maupun pola mobilitas menjadi momentum penting untuk membangun daerah yang lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan.


Benuanta
Bersatulah kita semua,
Warga Kalimantan Utara,
Berpadu bersama suku dan agama,
Bersama bangun Benuanta...



BENUANTA :
BAHASA, IDENTITAS DAN SEMANGAT MEMBANGUN KALTARA

[Penulis : Ida Ayu Parlina[1]]

"Selamat datang di Benuanta".

Kalimat tersebut biasa digunakan sebagai salam yang mengekspresi kegembiraan dan kehangatan saat menyambut kedatangan tamu yang tiba di Kalimantan Utara. Kata benuanta tidak hanya digunakan pada ucapan selamat datang, tapi juga pada tema acara, baik pada forum resmi maupun pada kegiatan non formal lainnya. Kata benuanta berasal dari bahasa Bulungan.



Bahasa Bulungan adalah salah satu bahasa daerah di Kalimantan Utara. Di masa lalu, selain bahasa Melayu, bahasa Bulungan digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat di ruang publik, terutama di pusat pemerintahan Kesultanan Bulungan (sekitar Tanjung Palas dan Tanjung Selor).

Tak heran jika pada masa itu banyak orang yang menguasai bahasa Bulungan meskipun mereka bukan berasal dari suku Bulungan. Zaman dulu, banyak orang-orang dari etnis Cina, Arab, dan India banyak yang bisa berbahasa Bulungan.

Begitu pula suku-suku lainnya, banyak sesepuh dan orang-orang tua dari suku Tidung, Bugis, atau Banjar yang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Bulungan baik secara fasih maupun secara terbata-bata. Bahasa yang digunakan dalam berkumunikasi saling mempengaruhi.

Sebagai hasilnya, bahasa Bulungan memiliki banyak kosakata yang merupakan kata serapan dari bahasa daerah lain.

Posisi Tanjung Selor sebagai salah satu pintu masuk kapal dagang dan kapal penumpang ke pusat pemerintahan Kesultanan Bulungan membuat kota kecil ini menjadi tuan rumah kepada banyak orang dari berbagai suku dan etnis. Para pendatang itu ada yang berlabuh untuk sementara dan ada pula yang kemudian memutuskan menjadi penduduk tetap.

Hubungan antar penduduk lokal dan para perantau dari luar daerah sudah terjalin dengan harmonis sejak dahulu. Gambar di bawah ini menunjukan beberapa orang pria bangsawan dalam suatu acara

yang digelar di istana, dari nama dan pakaian yang dikenakan dapat ditebak asal pria-pria tersebut.

Foto ini adalah salah satu bukti kerukunan dalam keberagaman yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh pemerintahan Kesultanan Bulungan. Terkait dengan semangat persatuan, ada satu kalimat terkenal dalam bahasa Bulungan yang menjadi perekat rasa kebersamaan antar warga, yaitu: Merudung Pebatun de Benuanta yang berarti: Bersama membangun di daerah kita.



Dari kiri ke kanan :
Pangeran Khar, Pangeran Tua Abdul Kadir gelar Aji Iskandar alias Tama Nisai, Nyo Keng Song, Andi Musu, Dt. Bendahara, Dt. Pardana, Kadi, Ambo Aka, Dt. Nasir

Sekitar tahun 80-an masih ada tauke, tuan atau nyonya (panggilan untuk para pedagang) yang bisa bertutur dalam Bahasa Bulungan, mereka adalah keturunan dari para saudagar dan perantau dari berbagai etnis yang memutuskan menetap di Tanjung Selor.

Di masa lampau, ibu kota Kalimantan Utara ini merupakan kota dagang yang ramai. Sehingga bukan hal yang aneh jika ditemukan seorang tauke menawarkan dagangannya menggunakan Bahasa Bulungan atau seorang saudagar berbangsa India bertransaksi dengan pembeli lokal dengan Bahasa Bulungan.

Namun sayang, generasi pedagang dan pengusaha yang menguasai bahasa Bulungan terputus pada orang-orang tua yang digolongkan sebagai *The Builders* (generasi yang lahir sebelum 1946), karena generasi mereka selanjutnya hampir tidak ada lagi yang menguasai bahasa Bulungan.

Mengingat eratnya keterkaitan sejarah masa lalu ini tidak mengherankan ketika Provinsi Kalimantan Utara dibentuk, kata 'benuanta' dijadikan semboyan daerah. Kata yang tertera pada pita di lambang daerah itu secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu benua yang artinya daerah dan ta atau nta yang artinya kita. Mari kita kupas secara terperinci:

1. Kata benua selain berarti daerah atau wilayah juga dapat digunakan untuk menggambarkan cuaca atau hari, contohnya:

    - Untuk menggambarkan cuaca yang mendung orang Bulungan menggunakan diksi ritong benua. Kata ritong artinya gelap dan benua artinya daerah. Jadi ritong benua berartinya gelap daerah yang merujuk pada cuaca gelap yang bermakna cuaca mendung.
    - Untuk menggambarkan waktu atau hari sudah siang orang Bulungan menggunakan kalimat tereng penga benua. Kata tereng artinya terang, penga artinya sudah, jadi kalimat tereng penga benua artinya adalah terang sudah daerah yang bermakna hari sudah terang atau hari sudah siang.

    Dalam hal ini, arti kata benua pada semboyan daerah Kalimantan Utara mengandung makna yang luas, bukan sekedar daerah atau wilayah, tapi juga mencakup kekayaan dan kondisi alam, penduduk dengan keragaman suku dan bahasa, budaya dan adat istiadat, sejarah masa lalu, impian masa depan, dsb.

2. Kata ta atau karena pengaruh aksen menjadi nta memiliki arti kita. Kata kita

memberikan penekanan pada rasa memiliki, rasa sayang, rasa kebersamaan yang ditujukan pada Kalimantan Utara. Kata ta yang dimaksud pada semboyan itu adalah seluruh warga Kalimantan Utara tanpa terkecuali. Kita adalah Kaltara. Masa depan Kalimantan Utara adalah tanggung jawab KITA bersama.

3. Kata Benuanta adalah sebuah semboyan yang singkat, tetapi memiliki kekuatan magis yang memberikan rasa sayang dan kehangatan di dalam hati, ibarat mantra yang menggugah semangat untuk berbakti kepada Kalimantan Utara.

Adapun kedudukannya sebagai semboyan daerah, kata Benuanta memiliki makna yang mirip dengan semboyan beberapa daerah lain, seperti contoh berikut:

- Kabupaten Kutai Kertanegara dengan semboyan Benua Etam yang artinya daerah tempat kita berasal.
- Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki semboyan daerah Banuo Taka yang memiliki arti daerah kita atau kampung halaman kita.
- Kota Tarakan dengan semboyan daerah Pagun Taka yang berarti kampung kita.

Penjelasan resmi pada laman kaltaraprov.go.id tentang lambang daerah Kalimantan Utara disebutkan bahwa kata Benuanta memiliki makna wilayah kita atau daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Demikianlah arti dan makna dari semboyan daerah Benuanta. Tulisan ini saya tutup dengan satu bait lirik Mars Kaltara ciptaan Addie MS.

Bersatulah kita semua,
Warga Kalimantan Utara,
Berpadu bersama suku dan agama,
Bersama bangun benuanta...

[1] Pegiat Literasi





Festival Meja Panjang

Ketika Budaya, Kebersamaan, dan Seni Berpadu di Awal Tahun



Festival Kesenian Meja Panjang merupakan agenda rutin yang digelar setiap awal tahun sebagai wujud syukur warga Desa Pimping kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menariknya, festival ini telah didaftarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Sebuah pencapaian membanggakan bagi Kalimantan Utara.

Daya tarik Meja Panjang tidak hanya terletak pada rangkaian puncak perayaannya, seperti pertunjukan musik dan tarian, parade Udoq (manusia bertopeng), hingga sajian kuliner khas Dayak yang tertata rapi di atas meja panjang. Semua hidangan tersebut dapat dinikmati secara gratis oleh siapa pun.

Namun, nilai yang paling berkesan justru terletak pada semangat kebersamaan warga. Tanpa memandang perbedaan suku maupun agama, mereka bergotong royong mulai dari persiapan, menjaga ketertiban dan kebersihan desa selama perayaan berlangsung, hingga kembali bahu membahu membersihkan area pascaperayaan. Semangat inilah yang menjadi filosofi inti dari Pagelaran Meja Panjang.

Momen ini juga menjadi kesempatan emas bagi warga lokal untuk memasarkan hasil bumi, kerajinan tangan, ukiran, serta pahatan tradisional. Bagi para kolektor atau pecinta seni, ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan karya autentik yang dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil pengrajin setempat.

Konsistensi warga Desa Pimping dalam menjaga tradisi ini tak luput dari perhatian Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Ingkong Ala, dan Bupati Bulungan, Syarwani. Kehadiran mereka pada perayaan Sabtu (3/1) lalu menjadi sinyal kuat bahwa Festival Meja Panjang bukan sekadar acara lokal, melainkan bagian dari pelestarian budaya daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan komitmen Pemprov Kaltara untuk terus mendorong penguatan ekosistem budaya, termasuk melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Kami mengajak Anda untuk turut menyaksikan kehangatan dan kemegahan Festival Kesenian Meja Panjang pada awal tahun 2027 mendatang. Datanglah, rasakan atmosfer kebersamaannya, cicipi kuliner khasnya, saksikan pertunjukan budayanya, dan dukung langsung para pengrajin serta pelaku ekonomi kreatif Desa Pimping. Setiap kunjungan Anda merupakan bentuk nyata pelestarian warisan yang tak ternilai harganya.

Sampai jumpa di Desa Pimping pada awal tahun 2027. Bawalah rasa ingin tahu, dan tinggalkanlah apresiasi Anda.

Teks : Linda Marlisa
Foto : Biro Adpim





MEJA PANJANG







#bangga melayani bangsa
BerAKHLAK

Selamat dan Sukses

kepada

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

atas diraihnya penghargaan

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) AWARD TAHUN 2026

KATEGORI MADYA

SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH KATEGORI MADYA
DALAM PENCAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

27 JANUARI 2026



#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

INDONESIA GOLDEN AWARDS 2026

INNOVATION BEST PERFORMANCE

Selamat dan Sukses

kepada

DR. H. ZAINAL A PALIWANG, S.H., M.HUM

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dengan penghargaan

THE BEST GOVERNOR 2026

sebagai Gubernur dengan kinerja terbaik dalam membangun sinergi, kolaborasi dan pelayanan kepada masyarakat

pada

INDONESIA GOLDEN AWARD 2026

Oleh Seven Media Asia

Bali, 29 Januari 2026

